



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA

LAKjIP

(LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 dapat tersusun.. Penyusunan LKjIP ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan juga merupakan alat kendali atau alat pemacu kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya.

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, memiliki komitmen besar terhadap pembangunan berkelanjutan. Komitmen tersebut tertuang dalam Visi pembangunan daerah Kabupaten Jayawijaya periode RPJMD 2018 - 2023 yaitu "**Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya yang sejahtera Mandiri secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya**". Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan satu misi yang menjadi urusan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu "**Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik**". selanjutnya misi tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategi (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 - 2023 yang digunakan sebagai landasan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2019.

Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 berfungsi sebagai pedoman kerja operasional yang harus dipertanggungjawabkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan LAKjIP ini masih jauh dari sempurna, namun besar harapan kami semoga dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait.

Akhirnya semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 ini, dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya akan diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

KEPALA BADAN



SEMUEL PATASIK, S.Pi
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197207101994031010

The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA' at the top and 'JAWA BARU' at the bottom, separated by two stars. The inner border contains the text 'BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH'.



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 - 2023. LKjIP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD menuju terwujudnya good governance yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2019 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan. Untuk mencapai visi dan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya menetapkan 2 (dua) sasaran strategis, dengan 2 (dua) indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut merupakan ikhtisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas	OPini BPK	WTP	Menunggu hasil pemeriksaan BPK	Menunggu hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuda Tahun 2019
Mengoptimalkan Eksternsifikasi dan Intensifikasi Pendapatan Daerah	Prosentase PAD terhadap Pendapatan	3,2 %	3,1 %	96,87%

Capaian IKU Opini BPK tahun 2018, adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya tahun 2018, merupakan capaian kinerja tahun 2018 yang memperoleh penilaian pada tahun 2019, sedangkan realisasi IKU Opini BPK pada tahun 2019 baru dapat dilihat pada tahun 2020. Sedangkan capaian kinerja Prosentase PAD terhadap Pendapatan tahun 2019 dapat dilihat pada tahun 2020 dengan membandingkan PAD dengan total Pendapatan. Untuk mewujudkan IKU Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah, maka didukung dengan Indikator bidang sebagai berikut :

Sasaran Startegis Eselon II	Sasaran Program Eselon III (Outcame)	Indikator Kinerja Program Eselon III (Outcame)	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas	Opini BPK	1. Prosentase SP2D yang cair sesuai ketentuan	100%	100%	100%
		2. Prosentase Dana Transfer	100%	100%	100%
		1. Prosentase Dokumen RKA/DPA yang diverifikasi	100%	100%	100%
		2. Batas Waktu Penyusunan APBD sesuai aturan	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
		1. Prosentase Tertib Pengelolaan BMD	30%	3%	10%
		1. Prosentase Laporan Keuangan DKPD dan SKPKD sesuai basis Akrual	100%	100%	100%
Mengoptimalkan Eksternsifikasi dan Intensifikasi Pendapatan Daerah	Prosentase PAD terhadap Pendapatan	1. Prosentase Penetapan Potensi Pajak daerah	18%	19,28%	102%
		1. Prosentase Realisasi Pajak Daerah	18%	19,87%	110%
		2. Prosentase Penagihan Piutang Pajak Daerah	53%	53%	100%

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
BAB.I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum SKPD	4
1.2.1. Kedudukan	4
1.2.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi	6
1.4. Permasalahan Utama Yang Dihadapi	7
1.5. Landasan Hukum	8
1.6. Sistematika Penulisan	10
BAB.II PERENCANAAN KINERJA	12
2.1. Perencanaan Strategis	12
2.1.1. Visi	12
2.1.2. Misi	12
2.1.3. Tujuan	14
2.1.4. Sasaran	14
2.1.5. Strategi	15
2.1.6. Kebijakan	15
2.2. Indikator Kinerja sasaran dan target kinerja sasaran	18
2.3. Penetapan Kinerja	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019	21
3.1. Kerangka Pengukuran dan Evaluasi kinerja	21
3.2. Capaian Indikator kinerja utama tahun 2019	24
3.3. Evaluasi dan analisis capaian kinerja	26

3.4. Akuntabilitas Keuangan	50
3.5. Evaluasi dan analisis akuntabilitas	53
BAB IV PENUTUP	55
4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja	55
4.2. Strategis Untuk Peningkatan Kinerja Dimasa Datang	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Tahunan sebagai bentuk laporan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai salah satu entitas akuntabilitas kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Jayawijaya yang menyelenggarakan tugas pembantuan pada bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah atas penggunaan anggaran belanja daerah yang telah dialokasikan. Penyusunan laporan kinerja ini sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan ini, sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2019 sesuai dengan amanat dalam rangka pencapaian misi yang telah ditetapkan melalui pengukuran atas pencapaian sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebagai wujud komitmen kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terhadap Bupati Jayawijaya dalam meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dengan mencantumkan target kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Selain itu Laporan Kinerja tahun 2019 juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas apa yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai bagian dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mendorong

terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

- Sebagai bahan evaluasi berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- Menginformasikan pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja kepada pemberi mandat dalam .
- Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD.

Penyelenggaraan SAKIP ini dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras dan sesuai dengan tahapan-tahapan meliputi :

1. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan instansi pemerintah dalam periode 5 (lima) tahunan. Rencana strategis ini menjadi dokumen perencanaan untuk arah pelaksanaan program dan kegiatan dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP.

2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja selain berisi perjanjian penugasan/pemberian amanah, juga terdapat sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang diperjanjikan untuk dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun serta memuat rencana anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis.

3. Pengukuran kinerja

Pengukuran kinerja merupakan langkah untuk membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan.

Pengukuran kinerja dilakukan oleh penerima tugas atau penerima amanah pada seluruh instansi pemerintah.

4. Pengelolaan Kinerja

Pengelolaan kinerja merupakan proses pencatatan/registrasi, penatausahaan dan penyimpanan data kinerja serta melaporkan data kinerja. Pengelolaan data kinerja mempertimbangkan kebutuhan instansi pemerintah sebagai kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi dan statistik pemerintah.

5. Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja adalah proses menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan.. Laporan Kinerja Tahunan paling tidak memuat perencanaan strategis, pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah, realisasi pencapaian sasaran strategis dan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja.

6. Reviu dan Evaluasi Kinerja

Reviu merupakan langkah dalam rangka untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan kepada pimpinan. Reviu tersebut dilaksanakan oleh Aparat pengawasan intern pemerintah dan hasil reviu berupa surat pernyataan telah direviu yang ditandatangani oleh Aparat pengawasan intern pemerintah. Sedangkan evaluasi kinerja merupakan evaluasi dalam rangka implementasi SAKIP di instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan

kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

1.2. GAMBARAN UMUM SKPD

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Jayawijaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Perda tersebut BPKAD adalah Badan yang melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan dan aset dan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

1.2.1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 44 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya.

Dalam melaksanakan Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas :

“ Membantu Bupati melaksanakan Urusan Penunjang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jayawijaya“

1.2.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Struktur organisasi BPKAD sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 44 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Jayawijaya memiliki formasi sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - 3) Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Anggrana Daerah 1;
 - 2) Sub Bidang Perencanaan Anggrana Daerah 2;
 - 3) Sub Bidang Perencanaan Anggrana Daerah 3;
4. Bidang Perbendaharaan Daerah, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Perbendaharaan Daerah 1;
 - 2) Sub Bidang Perbendaharaan Daerah 2;
 - 3) Sub Bidang Perbendaharaan Daerah 3;
5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Akuntansi;
 - 2) Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah;
6. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah 1;
 - 2) Sub Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah 2;
 - 3) Sub Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah 3
7. Bidang Perencanaan Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, yang membawahi :
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Perencanaan pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah 1;

- 2) Sub Bidang Perencanaan Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah 2;
- 3) Sub Bidang Perencanaan pengembangan pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah3;
8. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, yang membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah 1;
 - 2) Sub Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah 2;
 - 3) Sub Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah 3;
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Jayawijaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Jayawijaya Tahun 2016 Nomor 14). Berdasarkan Perda tersebut BPKAD adalah Badan yang melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan dan aset dan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah , yang dipimpin oleh seorang kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah,.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, BPKAD mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penyusunan regulasi dan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Pemberian dukungan dan koordinasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Penyusunan pedoman, penataan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;

- e. Perumusan dan penyusun pendapatan serta koordinator pendapatan daerah;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Permasalahan Utama Yang Dihadapi

Permasalahan utama yang dihadapi pada Badan pengelola Keuangan dan aset Daerah Jayawijaya yang keberadaannya merupakan hambatan dan kendala dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Dapat diidentifikasi, sebagai berikut :

1. Pemahaman Aparatur pengelola keuangan dan aset terhadap regulasi pengelolaan keuangan dan aset belum memadai.
2. Penguasaan Apartur pengelola keuangan dan aset terhadap teknologi informasi khususnya sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset masih belum memadai.
3. Belum trampilnya aparatur dalam menerapkan Satuan Standar Harga (SSH) Barang dan Jasa
4. belum diterapkannya Analisis Standar Biaya (ASB) dalam penyusunan anggaran.
5. Belum adanya hasil evaluasi indikator kinerja sebagai input perencanaan penganggaran tahun berikutnya.
6. Verifikator SKPD belum optimal dalam pelaksanaan pekerjaan pengelolaan keuangan secara administrasi maupun pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
7. Belum lengkap dan akuratnya pendataan Barang Milik Daerah sebagai dasar penyusunan Aset Tetap pada Neraca.
8. Terdapat aset tanah yang belum bersertifikat.
9. Kurangnya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
10. Kurangnya Sarana Informasi Pajak dan retribusi.

11. Data Wajib Pajak dan Retribusi Daerah kurang akurat.
12. Belum adanya aparatur yang berpendidikan spesialis pajak
13. Rendahnya Tingkat Kedisiplinan ASN
14. Rendahnya pemahaman tupoksi
15. Minimnya sarpras aparatur

1.5. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Jayawijaya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 12969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberian Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20.M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 03 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023;
10. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 44 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaann Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya;
11. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan kinerja BPKAD adalah :

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Gambaran Umum SKPD

1.2.1. Kedudukan

1.2.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

1.4. Permasalahan Utama Yang Dihadapi

1.5. Landasan Hukum

1.6. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

2.1.1. Visi

2.1.2. Misi

2.1.3. Tujuan

2.1.4. Sasaran

2.1.5. Strategi

2.1.6. Kebijakan

2.2. Indikator Kinerja sasaran dan target kinerja sasaran

2.3. Penetapan Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

3.1. Kerangka Pengukuran dan Evaluasi kinerja

3.2. Capaian Indikator kinerja utama tahun 2019

3.3. Evaluasi dan analisis capaian kinerja

3.4. Akuntabilitas Keuangan

3.5. Evaluasi dan analisis akuntabilitas

BAB IV PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

4.2. Strategis Untuk Peningkatan Kinerja Dimasa Datang

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

2.1.1. Visi

Visi merupakan pandangan masa depan yang dapat menyatukan (konsensus) semua orang untuk bekerja sama dalam mencapainya dan memberikan keyakinan bahwa kita akan menuju satu sasaran tertentu. Visi dapat menunjukkan kepedulian atas kondisi lingkungan dan keinginan mencapai kondisi yang lebih baik, berkaitan dengan tantangan yang dihadapi. Visi merupakan cara pandang yang jauh kedepan yang menggambarkan apa yang ingin dicapai dari organisasi kedepan. Visi sekalipun merupakan cita-cita yang bersifat jangka panjang, tetapi visi bukanlah mimpi yang tidak mungkin dicapai, karenanya visi harus logis, rasional dan dapat diwujudkan.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 bahwa Visi Pembangunan Kabupaten Jayawijaya yang ditetapkan untuk tahun 2018-2023 adalah :

” Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya yang Sejahtera Mandiri secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya ”

2.1.2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya, ditetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik ;
2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM;
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai potensi unggulan lokal dan pengembangan wilayah berbasis kultural secara berkelanjutan;
4. Meningkatkan kondisi masyarakat yang harmonis, damai dan utuh dengan memperhatikan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP);

5. Meningkatkan infrastruktur untuk mendorong sektor jasa dan pariwisata secara berkelanjutan.

Memperhatikan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Jayawijaya sebagaimana yang tersirat pada RPJMD Kabupaten Jayawijaya tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya sebagai unsur staf mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut BPKAD Kabupaten Jayawijaya menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
5. Pelaksanaan Fungsi Bendaharawan Umum Daerah;
6. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
7. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjabarkan Visi dan Misi sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jayawijaya dimaksud, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya menjadikan RPJMD sebagai dasar acuan untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang memuat tentang isu-isu strategis, perencanaan anggaran, program dan kegiatan. Berdasarkan Renstra tersebut, dilakukan identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Jayawijaya serta mensinergikan arah, kebijakan, visi dan misi

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD misi KESATU : ” ***Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*** ” dengan program prioritas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya, sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Pengelolaan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;

2.1.3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Adapun Tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Jayawijaya dalam merealisasikan visi dan misi adalah sebagai berikut :

- (1).Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- (2).Meningkatnya Kemandirian Fiskal .

2.1.4. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun Sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam perencanaan strategi organisasi.

Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Jayawijaya adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas;
- b. Mengoptimalkan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah.

2.1.5. Strategi

.Langkah Langkah Strategis yang Diambil Oleh Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Badan maka ditetapkan strategi sebagai berikut :

1. Pengkajian rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan pendapatan keuangan dan aset daerah yang tepat sasaran dan akuntabel.
2. Peningkatan sistem administrasi pendapatan Belanja dan aset daerah yang handal.
3. Transparansi pengelolaan pendapatan keuangan dan aset daerah
4. Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan kebutuhan
5. Sosialisasi Perda tentang Pajak dan retribusi Daerah
6. Optimalisasi pengawasan, pengendalian internal, dan pengkoordinasian pendapatan sesuai regulasi dibidang pajak dan retribusi daerah.
7. Pengembangan sistem informasi pendapatan pemenuhan SDM yang handal

2.1.6. Kebijakan

Berdasarkan rumusan strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya, ditetapkan rumusan kebijakan sebagai berikut :

1. Menyiapkan dan mengembangkan sistem penganggaran dan pengelolaan keuangan dan aset secara transparan dan akuntabel
2. Mengembangkan potensi kemampuan personil sesuai Bidang tanggungjawabnya.
3. Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan SKPD yang Transparan dan bertanggungjawab yang dilaksanakan dalam Proses manajemen yang baik.
4. Sosialisasi Perda tentang Pajak dan retribusi Daerah.
5. Pengembangan sisten informasi manajemen objek Pajak.
6. Pemutahiran Data Basis Pajak
7. Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Kebijakan BPKAD diatas, diimplementasikan didalam Program yang telah ditetapkan BPKAD Kabupaten Jayawijaya untuk Tahun 2019 yaitu:

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik (telepon, faksimili dan internet)
- c. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ oprerasional
- d,. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- g. Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kator
- h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- i. Penyediaan Makanan dan Minuman
- j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
- k. Sosialisas/ penyuluhan / Survey Lapangan Monitoring Dalam Daerah

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pengadaan Peralatan Gedung kantor;
- b. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional;

- c. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor;
- d. Rehabilitasi Sedang/ berat gedung kantor;

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a. Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan

D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- b. Penyusunan Laporan Keuangan Semester. Dan Prognosis.
- c. Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPKD.

E. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Penyusunan Satuan Standar Harga
- b. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
- c. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
- d. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- e. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
- f. Peningkatan manajemen asset/ barang daerah
- g. Revaluasi/ appraisal asset/ barang daerah.
- h. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan daerah
- i. Penyusunan Pedoman Rancangan Kerja dan Anggaran
- j. Peningkatan Pengelolaan Gaji PNS
- k. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Kas Daerah
- l. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Daerah
- m. Sosialisasi paket regulasi tentang pajak dan retribusi daerah.
- n. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- o. Optimalisasi Penagihan Pajak Daerah dan Piutang Pajak
- p. Fasilitasi penatausahaan hibah dan bansos
- q. Revisi Perda no 2, dan no 3 tentang Pajak dan retribusi.
- r. Penyusunan KUA, PPA dan KUA, PPA Perubahan, PPA

2.2. Indikator Kinerja Sasaran dan target Kinerja Sasaran

Indikator Kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator Kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi, selanjutnya apabila didukung dengan suatu system pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya, adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Program	Sumber Data
Indikator Kinerja Utama (Eselon II)			
1.	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas	Opini BPK	Laporan Keuangan SKPD
2.	Mengoptimalkan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah	Prosentase PAD terhadap Pendapatan	Laporan Realisasi Pendapatan
Indikator Kinerja Program (Eselon III)			
1.	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas	Prosentase SP2D yang Cair sesuai ketentuan	SPM SKPD
2		Prosentase Laporan Dana Transfer	Laporan Penerima Dana Transfer
3		Prosentase Dokumen RKA/ DPA yang diVerifikasi	Draf RKA-SKPD
4		Batas Waktu Penyusunan APBD sesuai Ketentuan	RKA Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
5		Prosentase Tertib Peneglolaan	Laporan Keruangan

		BMD	
6		Prosentase Laporan Keuangan SKPD dan SKPKD sesuai basis Akrual	Lapran Keuangan SKPD
7	Mengoptimalkan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah	Prosentase Penetapan Potensi Pajak Daerah	Sumber 9 Objek Pajak Daerah
8		Prosentase Realisasi Pajak daerah	Penerimaan BPKAD
9		Prosentase Penagihan Piutang Pajak Daerah	Laporan Keuangan

2.3 Penetapan Kinerja

Dokumen penetapan kinerja (PK) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja /kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi/satuan organisasi dalam periode waktu satu tahun. Dokumen penetapan kinerja yang telah disusun merupakan komitmen Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun sebagaimana yang telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala BPKAD sebagai pihak pertama sebagai penerima amanah dengan Bupati Jayawijaya sebagai pihak ke-dua dan Perjanjian Kinerja antara Kepala Bidang sebagai pihak pertama sebagai penerima amanah dengan Kepala BPKAD sebagai pihak ke-dua, sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Program	Target
Penetapan Kinerja Kepala Badan			
1	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas	Opini BPK	WTP
2	Mengoptimalkan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah	Prosentase PAD terhadap Pendapatan	3,2 %
Penetapan Kinerja Kepala Bidang			

1	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas	Prosentase SP2D yang Cair sesuai ketentuan	100%
2		Prosentase Lasporan Dana Transfer	100%
3		Prosentase Dokumen RKA/ DPA yang diVerifikasi	100%
4		Batas Waktu Penyusunan APBD sesuai Ketentuan	Tepat waktu
5		Prosentase Tertib Peneglolaan BMD	30%
6		Prosentase Lasporan Keuangan SKPD dan SKPKD sesuai basis Akuyreal	100%
7	Mengoptimalkan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah	Prosentase Penetapan Potensi Pajak Daerah	18%
8		Prosenatse Realisasi Pajak daerah	18%
9		Prosentase Penagihan Piutang Pajak Daerah	53%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 12.636.150.388,-	-
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 1.775.000.000,-	-
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 0	-
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 2.162.700.000,0	-
5.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 13.776.698.000,0	-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. BPKAD Kabupaten Jayawijaya melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018 - 2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2019. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Bupati Jayawijaya

3.1. Kerangka Pengukuran dan Evaluasi Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat untuk menilai keberhasilan atau kegagalan kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan guna mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan. Proses pengukuran kinerja ini digunakan sebagai alat untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dilanjutkan dengan menggunakan

formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Indikator kegiatan yang ditetapkan dikategorikan ke dalam komponen yaitu sebagai berikut :

1. Masukan (Inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, misalnya dana, sumber daya manusia, material, informasi, kebijakan/peraturan perundang undangan dan sebagainya.
2. Keluaran (Outputs) adalah segala sesuatu berupa produk/ barang jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu program dan kegiatan berdasarkan masukan yang digunakan.
3. Hasil (Outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah atau akibat langsung dari pelaksanaan kegiatan.
4. Manfaat (Benefit) adalah berfungsinya suatu keluaran (outputs) yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat tersebut baru kelihatan/diketahui setelah beberapa waktu kemudian khususnya dalam jangka menengah dan jangka panjang.
5. Dampak (Impact) memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat baik positif maupun negatif yang diperoleh dari hasil kegiatan seperti halnya indikator manfaat, indikator dampak juga pada umumnya baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang. Indikator impact ini menunjukkan dasar pemikiran dilaksanakannya kegiatan yang menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan.

Pada tahun 2019 pengukuran kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya mencakup penilaian tingkat pencapaian target (dari rencana tingkat capaian), kegiatan dari masing-

masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Perumusan pengukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya dengan mempertimbangkan indikator masukan, indikator keluaran dan indikator hasil, sedangkan indikator manfaat dan indikator dampak belum digunakan dikarenakan belum adanya sistem pengumpulan data kinerja yang belum memadai serta adanya beberapa kendala dalam pengukuran kegiatan-kegiatan pada tahap manfaat maupun tahap dampak.

Pengukuran kinerja meliputi Indikator kinerja pada tingkat sasaran yang merupakan tolak ukur keberhasilan sasaran agar dapat dicapai, dikelompokkan dalam 4 kategori capaian kinerja yaitu:

- a. < 55 % kategori kurang berhasil
- b. 55 % - 70 % kategori cukup berhasil
- c. 71 % - 85 % kategori berhasil
- d. 86 % - 100 % kategori sangat berhasil

Pengukuran Kinerja terdiri dari Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran.

1. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok inputs, outputs, outcomes, benefits dan impacts;menentukan satuan setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan;

2. Menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan prosentasenya.

Pada Tahun 2019 Badan Pengelola Keuangan Dan Aset daerah Kabupaten Jayawijaya memiliki DPA/ DPPA-SKPD yang terdiri dari 4 Program dan 35 Kegiatan.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategis Instansi Pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Hasil pengukuran kinerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya, dapat digunakan sebagai bahan pengambilan suatu tindakan yang diperlukan untuk mengevaluasi dan mengoreksi program/kegiatan pada tahun-tahun mendatang.

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

Selama periode tahun 2019 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah melaksanakan tugas pada urusan rumah tangga pemerintahan daerah yang tercermin dengan pencapaian atas indikator kinerja dari masing masing sasaran strategis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja BPKAD tahun 2019 . Capaian atas IKU BPKAD dapat digunakan sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Jayawijaya 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas	OPini BPK	WTP	Menunggu hasil pemeriksaan BPK	Menunggu hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuda Tahun 2019
2.	Mengoptimalkan Eksternsifikasi dan Intensifikasi Pendapatan Daerah	Prosentase PAD terhadap Pendapatan	3,2 %	3,1 %	96,87%

Capaian IKU Opini BPK tahun 2018, adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya tahun 2018, merupakan capaian kinerja tahun 2018 yang memperoleh penilaian pada tahun 2019, sedangkan realisasi IKU Opini BPK pada tahun 2019 baru dapat dilihat pada tahun 2020. Sedangkan capaian kinerja Prosentase PAD terhadap Pendapatan tahun 2019 dapat dilihat pada tahun 2020 dengan membandingkan PAD dengan total Pendapatan. Untuk mewujudkan IKU Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah, maka didukung dengan Indikator bidang sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja
Kepala Bidang BPKAD
Kabupaten Jayawijaya tahun 2019

No.	Sasaran Strategis Eselon II	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Indikator Kinerja Program Eselon III (Outcome)	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas	Opini BPK	1. Prosentase SP2D yang cair sesuai ketentuan 2. Prosentase Dana Transfer	100% 100%	100% 100%	100% 100%
			1. Prosentase Dokumen RKA/DPA yang diverifikasi 2. Batas Waktu Penyusunan APBD sesuai aturan	100% Tepat Waktu	100% Tepat waktu	100% Tepat Waktu
			1. Prosentase Tertib Pengelolan BMD	30%	3 %	10%
			1. Prosentase Laporan Keuangan DKPD dan SKPKD sesuai basis Akrua	100%	100%	100%
2.	Mengoptimalkan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan Daerah	Prosentase PAD terhadap Pendapatan	1. Prosentase Penetapan Potensi Pajak daerah	18%	19,28%	102%
			1. Prosentase Realisasi Pajak Daerah 2. Prosentase Penagihan Piutang Pajak Daerah	18% 53%	19,87% 53%	110% 100%

3.3 Evaluasi dan analisis capaian kinerja

1. Opini wajar Tanpa Pengecualian

Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD) merupakan Produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayawijaya tahun 2018 yang memuat Laporan, sebagai berikut :

- Realisasi Anggaran (LRA)
- Laporan Arus Kas,
- Laporan Operasional (LO),
- Neraca
- Laporan Perubahan Ekuitas (LPE),
- Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL),
- Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK),

LKPD Kabupaten Jayawijaya tahun 2018 disusun oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dimulai pada bulan Januari 2018 dengan mengkompilasi laporan laporan keuangan seluruh SKPD dan laporan keuangan PPKD terdiri LRA, neraca dan CaLK Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya tahun 2018 disampaikan melalui Sekretaris Daerah selaku Koordinator pengelolaan keuangan daerah kepada Bupati Jayawijaya selaku pemegang kekuasaan atas keuangan daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. LKPD Kabupaten Jayawijaya telah disampaikan oleh Bupati Jayawijaya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebelum diserahkan ke BPK, LKPD terlebih dahulu di reviu oleh Inspektorat Kabupaten Jayawijaya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada tahun 2018 BPK telah menerbitkan opini Wajar tanda Pengecualian (WTP). Pemberian opini WTP tersebut sebagai bentuk apresiasi dari BPK RI atas hasil pemeriksaan Laporan

Kuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya telah menyajikan kewajaran informasi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, efektivitas system pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Sedangkan pemberian Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2019 masih menunggu Pemeriksaan BPK yang dilakukan pada Tahun 2020.

Akan tetapi WTP tersebut masih terdapat kelemahan dalam system pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan Tahun 2018, Antara lain:

1. Pengelolaan Aset Pemerintah Kabupaten Jayawijaya belum Memadai.
2. Pengelolaan Tuntutan Ganti Rugi belum Memadai

Berdasarkan kelemahan tersebut,BPK merekomendasikan kepada Bupati Jayawijaya sebagai Berikut :

1. Memerintahkan OPD sebagai Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban penatausahaan barang milik daerah yang berada di bawah menguasaannya;
2. Memerintahkan Pengurus Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya melakukan penatausahaan barang milik daerah yang dalam penguasaannya secara tertib;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua perihal penerimaan block grant pada sekolah-sekolah;
4. Memerintahkan Kepala BPKAD membuat SOP terkait penatausahaan kerugian daerah.

A. Prosentase Laporan Keuangan SKPD dan SKPKD sesuai SAP Berbasis Akrual .

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, setiap entitas pelaporan, dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun dan menyajikan :

- a. Laporan Keuangan; dan
- b. Laporan Kinerja

Upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah mengharuskan setiap pengelola keuangan daerah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu.

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang bersangkutan dan menyampaikan kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendaharawan Umum Daerah menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah kepada Bupati. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan Laporan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua, yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis kas yang ditetapkan dalam APBD, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah mengamanatkan penyajian laporan keuangan terdiri atas :

- I. Entitas Akuntansi (Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/SKPD), terdiri atas :
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - 2) Neraca;
 - 3) Laporan Operasional (LO);
 - 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - 5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
- II. Entitas Pelaporan (SK-PKD) terdiri atas :
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
 - 3) Neraca;
 - 4) Laporan Operasional (LO);
 - 5) Laporan Arus Kas (LAK);
 - 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Manfaat penggunaan basis akuntansi berbasis akrual bagi Pemerintah Daerah antara lain :

- 1) Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan Pemerintah Daerah;
- 2) Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah;
- 3) Pengendalian defisit anggaran dan akumulasi biaya pemerintah daerah lebih baik;
- 4) Bermanfaat dalam hal mengevaluasi kinerja pemerintah daerah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan Pemerintah Daerah selama 1 tahun periode pelaporan. LKPD terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan seperti peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

LKPJ Kabupaten Jayawijaya yang disusun menyajikan informasi yang bermanfaat dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dengan:

1. Menyediakan informasi/data mengenai jumlah pendapatan yang bisa dicapai
2. Menyediakan informasi/data mengenai jumlah pengeluaran yang bisa dicapai
3. Menyediakan informasi data guna mengevaluasi hasil hasil yang telah dicapai selama 1 tahun periode laporan

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan pada tahun 2019, ini adalah:

1. Menghimpun bahan, data dan informasi yang berkaitan dengan laporan Keuangan (SKPD)
2. Mereviu laporan Keuangan SKPD dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
3. Melakukan Konsolidasi laporan Keuangan SKPD dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jayawijaya secara periodik (Semesteran dan Tahunan)
4. Menyampaikan LKPD Kabupaten Jayawijaya (Un Audited) ke Inspektorat Kabupaten Jayawijaya untuk direviu
5. Menyampaikan LKPD Kabupaten Jayawijaya (Un Audited) yang telah direviu Inspektorat Kabupaten Jayawijaya ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua untuk diaudit
6. Melakukan Peyesuaian/koreksi dari BPK RI atas LKPD Kabupaten Jayawijaya (un-Audited)
7. Melakukan Konsolidasi Laporan Realisasi APBD SKPD dalam rangka penyusunan laporan realisasi APBD Kabupaten Jayawijaya setiap bulan.

8. Menyampaikan Laporan Realisasi APBD Kabupaten Jayawijaya setiap awal bulan berikutnya ke Kementrian Keuangan Republik Indonesia

Capaian indikator kinerja Prosentase Laporan Keuangan SKPD dan SKPKD sesuai SAP Berbasis Akrual yaitu sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian	
1.	Prosentase Laporan Keuangan SKPD dan SKPKD sesuai SAP berbasis Akrual	100%	100%	100%	Sangat Baik

B. Prosentase Dokumen RKA/ DPA yang diverifikasi.

Salah satu Indikator kinerja Program Bidang Anggaran dalam mendukung pencapaian Opini BPK dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas adalah Prosentase dokumen RKA/ DPA yang terverifikasi

Sebanyak 69 RKA/ DPA SKPD yang ditargetkan untuk diverifikasi telah diverifikasi sebanyak 69 Atau mencapai 100%

Kendala utama dalam mencapai Indikator Kinerja ini adalah : Terlambatnya penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen rujukan untuk menyusun KUA dan PPAS yang berdampak pada terbatasnya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan verifikasi RKA/ DPA.

Sesuai ketentuan PP Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah , diatur bahwa penyusunan RKA SKPD dilakukan mulai pada bulan juli tahun berjalan sampai bulan September, dengan kata lain proses verifikasi RKA – SKPD seyognya dilakukan 3 (tiga) bulan terhitung sejak pedoman penyusunan RKA-SKPD.

Kondisi ini belum sepenuhnya dapat dilaksanakan sehubungan terlambatnya penetapan dokumern RKPD, sehingga diharapkan penyusunan seluruh dokumen perencanaan harus konsisten dengan siklus penyusunan APBD agar tersedia cukup waktu untuk melakukan Verifikasi RKA-SKPD sehingga RKA yang

menjadi dokumen acuan Penyusunan APBD sesuai aturan dan memiliki kualitas yang baik.

Capaian indikator kinerja Prosentase Dokumen RKA/ DPA yang diverifikasi yaitu sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian	
1.	Prosentase Dokumen RKA/ DPA yang Diverifikasi	100%	100%	100%	Sangat Baik

Hasil verifikasi 69 SKPD terhadap Program / Kegiatan pada Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dapat dilihat pada lampiran : Tabel 3.1

C. Batas waktu penyusunan APBD sesuai aturan

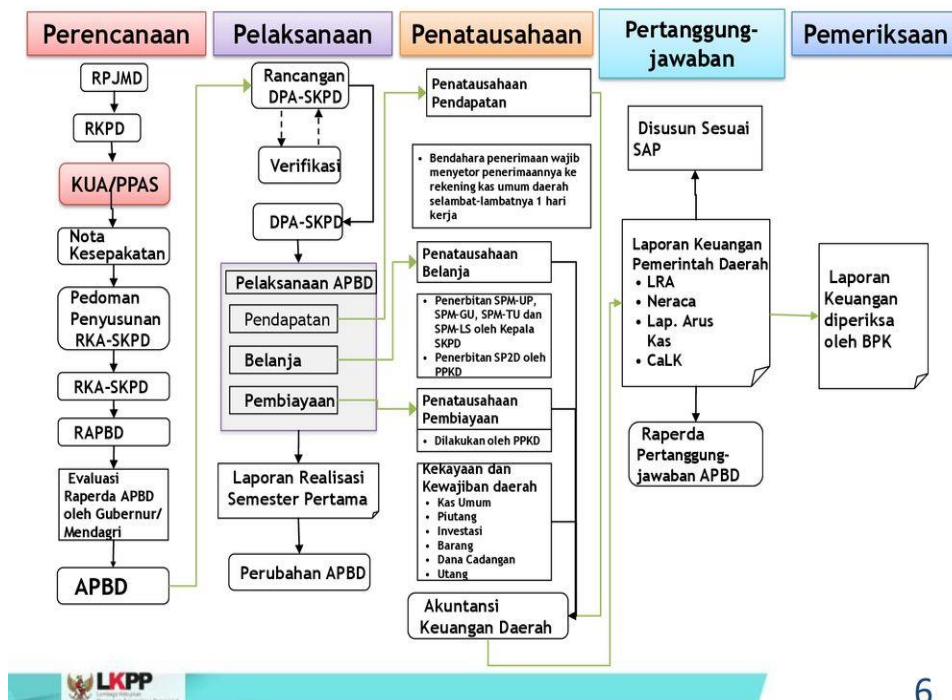
Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya telah menetapkan APBD tepat waktu, sesuai ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 bahwa Pemerintah Daerah harus menetapkan APBD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir dan target serta ketentuan ini telah tercapai 100%.

Kendala Utama dalam mencapai target Indikator ini adalah belum konsistennya penyusunan dokumen perencanaan sebagai rujukan penyusunan dokumen APBD.

Capaian indikator kinerja Batas Waktu Penyusunan APBD sesuai ketentuan yaitu sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian	
1.	Batas Waktu Penyusunan APBD sesuai ketentuan	Tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	

Siklus APBD



6

D. Persentase SP2D yang terbit tepat Waktu (maksimal 2 hari kerja)

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. Berdasarkan pasal 217 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, proses penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM yang merupakan SPM yang telah lengkap dan benar berdasarkan hasil verifikasi PPK-SKPD.

Penerbitan SP2D yang tepat waktu dilakukan guna menjamin pencairan dan penyerapan anggaran dapat dilakukan secara optimal. Optimalnya penyerapan anggaran diharapkan mampu mendorong roda perekonomian masyarakat di Kabupaten

Jayawijaya serta membantu memastikan program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu.

Pengelolaan dan pengendalian belanja daerah dilaksanakan sebagai upaya tertib administrasi keuangan daerah dalam Mendukung tercapainya Sisten Pengendalian Internal Pemerintah Daerah yang handal dan akuntabel.

Tahapan Kegiatan pengelolaan dan pengendalian pengeluaran keuangan daerah dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penetapan pengelola keuangan dengan Surat Keputusan Bupati yang terdiri dari Bendahara Pengeluaran DKPD, Bendahara pengeluaran SKPKD diawal tahun anggaran dengan mekanisme PPKD mengusulkan Calon Bendahara kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
2. Penetapan Anggaran Kas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
3. Melakukan pengendalian dan pengecekan kembali kelengkapan SPM yang telah mendapatkan Verifikasi PPK-SKPD dengan memastikan ketersediaan dana yang diajukan dalam APBD, kesesuaian pagu yang diajukan dengan DPA/DPPA dan Kelengkapan dokumen yang diajukan.

Dari hasil pengecekan tersebut bila didapati hal-hal yang tidak sesuai seperti berkas tidak lengkap, belum dipenuhi maka berkas akan ditolak dan dikembalikan untuk diperbaiki/dilengkapi sebagai upaya pengendalian dan penatausahaan.

Pengelolaan perbendaharaan dan kas umum daerah adalah merupakan kegiatan belanja yang mengakomodir peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dalam melaksanakan urusan pembayaran SP2D, melaksanakan

pungutan dan penyetoran perhitungan fihak Ketiga serta mencatat penerimaan dan pengeluaran kas daerah selama satu tahun

Capaian indikator kinerja Persentase SP2D yang terbit tepat waktu digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Persentase SP2D yang terbit tepat waktu (maksimal 2 hari kerja)	100 %	100%	100%	Sangat Baik

Submer Data : Laporan Realisasi SP2D Tahun 2019)

Pencairan Dana (SP2D) yang telah dilakukan tepat waktu.

No	Outcome	Jumlah SPM yang diterima	Jumlah SP2D yang diterbitkan	Realisasi Capaian Kinerja	Keterangan
1	Persentase SP2D yang terbit tepat waktu (maksimal 2 hari kerja)	13.095	13.095	100%	- Tepat waktu 2 hari setelah SPM diterima (SPM Lengkap dan benar - 1 SP2D tidak cair dikarenakan Rekening sampai dengan tgl 31 Desember 2020 tidak aktif

(Sumber Data : Laporan Realisasi SP2D Tahun 2019)

Rekapitulasi penerbitan SP2D Tahun 2019

No	Uraian	SP2D	Nilai SP2D (Rupiah)
1	SP2D UP	69	Rp 19.436.000.000
2	SP2D GU	4066	Rp 174.612.060.737
3	SP2D TU	1	Rp 149.951.300
6	SP2D LS	8959	Rp 1.224.781.872.259
	Jumlah	13.095	Rp 1.418.979.884.296

E. Prosentase Laporan dana Transfer.

Transfer ke Daerah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD Provinsi yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. Dana Transfer ke Daerah dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah, mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintahan antar daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah, mendanai pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan daerah. Transfer ke Daerah ditetapkan dalam APBN, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang selanjutnya dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran untuk tiap jenis Transfer ke Daerah dengan dilampiri rincian alokasi per daerah.

Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

DAK terbagi atas 2 jenis, DAK fisik dan non fisik. DAK fisik yaitu dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus **fisik** yang merupakan urusan daerah. DAK fisik terdiri atas DAK reguler, afirmasi, dan penugasan. DAK non fisik tidak jauh berbeda definisinya dengan DAK fisik, hanya saja DAK non fisik digunakan untuk mendanai kegiatan khusus **non fisik**. DAK non fisik terdiri atas Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus, Bantuan

Operasional Kesehatan (BOK), Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM), dan Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) .

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan dekonsentrasi, dibutuhkan dana dekonsentrasi yaitu dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertical pusat di daerah.

Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan atau dapat pula diartikan bahwa Dana tugas pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan Tahapan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2019 adalah:

1. Melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang alokasi Dana Transfer Daerah Kabupaten Jayawijaya.
2. Mengumpulkan bahan, data dan informasi atas yang mendapatkan alokasi.
3. Melakukan konsolidasi atas laporan realisasi penggunaan dana transfer melalui Aplikasi Omspan
4. Finalisasi dan cetak laporan realisasi penggunaan dana Transfer Daerah
5. penyampaian laporan realisasi penggunaan dana transfer ke Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Bupati.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, Penyaluran DAK Fisik per jenis per bidang subbidang secara bertahap, dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. tahap I paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Juli sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi;
- b. tahap II paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Oktober berdasarkan nilai kontrak yang terdapat dalam daftar kontrak kegiatan, dengan ketentuan:
 1. nilai kontrak lebih besar dari 70% (tujuh puluh persen) pagu alokasi disalurkan sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari nilai kontrak dimaksud;
 2. nilai kontrak lebih besar dari 25% (dua puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) pagu alokasi disalurkan sebesar selisih nilai kontrak dimaksud dengan penyaluran tahap I; dan
 3. nilai kontrak sampai dengan 25% (dua puluh persen) pagu alokasi tidak disalurkan.
- c. tahap III dilakukan untuk nilai kontrak dalam daftar kontrak kegiatan yang nilainya lebih besar dari 70% (tujuh puluh persen) pagu alokasi, paling cepat bulan September dan paling lambat bulan Desember sebesar selisih antara jumlah dana yang telah disalurkan sampai dengan tahap II dengan nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan.

Penyaluran DAK Fisik per jenis per bidang subbidang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Kepala KPPN menerima dokumen persyaratan penyaluran dengan lengkap dan benar, dengan ketentuan:

- a. tahap I berupa:
 1. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan;

2. laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output~ kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/ subbidang tahun anggaran sebelumnya;
 3. foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/ subbidang tahun anggaran sebelumnya.
 4. rencana kegiatan DAK Fisik per Jems per bidang/ subbidang yang telah disetujui oleh Kementerian Negara/Lembaga dan tercantum dalam sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi; dan
 5. daftar kontrak kegiatan DAK Fisik per jenis per bidangsubbidang yang meliputi data kontrak kegiatan, data bukti pemesanan barang atau bukti sejenis, data pelaksanaan kegiatan swakelola, dan/ atau data kegiatan dana penunjang;
- b. tahap II berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian keluaran (output~ kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/ subbidang sampai dengan tahap I; dan
 2. foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/ subbidang;
- c. tahap III berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian keluaran (output~ kegiatan DAK Fisik per Jenis per bidang/ subbidang sampai dengan tahap II yang menunjukkan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen);

2. laporan yang memuat nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan dengan capaian keluaran 100% (seratus persen) kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang; dan
3. foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/ subbidang.

Capaian indikator kinerja Persentase Laporan Dana Transfer, sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian	
1.	Prosentase Laporan Dana Transfer a. Dana Alokasi Khusus Reguler b. Dana Alokasi Khusus Afirmasi c. Dana Alokasi Khusus Penugasan d. Dana Alokasi Khusus Non Fisik e. DAU f. DBH	100%	100%	100%	Sangat Baik

F. Prosentase Tertib Pengelolaan BMD.

Pelaksanaan Sistem Akuntansi Aset tetap berbasis akrual di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya telah direkonsiliasi sampai kepada tahapan inventarisasi aset SKPD. Pada tahun Anggaran 2019 untuk pengakuan klasifikasi, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset tetap tahun 2019 pada SKPD yang telah dilakukan rekonsiliasi sebanyak 69 SKPD, namun SKPD yang telah selesai melalui tahapan inventarisasi hanya sebanyak 69 SKPD.

SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya telah mempedomani Peraturan Bupati dalam hal pengakuan, klasifikasi, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset. Peraturan Bupati dimaksud Antara lain:

1. Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor,,,,,Tahun tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Aset Tetap dalam PSAP 07 didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum, lebih lanjut dalam paragraph 7, aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Aset tetap dibagi menjadi 6 klasifikasi, yaitu:

- a. Tanah
- b. Peralatan dan Mesin
- c. Gedung dan bangunan
- d. Jalan, Irigasi dan Jaringan
- e. Aset tetap lainnya.
- f. Kontruksi dalam pengerjaan.

PSAP 07 tersebut memberikan pedoman bagi pemerintah dalam melakukan pengakuan, pengklasifikasian, pengukuran dan penyajian serta pengungkapan aset tetap berdasarkan peristiwa yang terjadi, seperti perolehan aset tetap pertama kali, pemeliharaan aset tetap, pertukaran aset tetap, perolehan aset dari hibah/donasi, dan penyusutan.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, Bidang Aset Daerah melakukan pembinaan kepada Pengurus Barang SKPD, pembinaan Akuntansi aset dilakukan secara langsung dengan melakukan pendampingan mulai dari pengolahan data sampai kepada Pelaporan. Bidang Aset Daerah menargetkan 10 orang pengurus barang yang memahami dan mampu melaksanakan akuntansi aset sesuai aturan.

Tahapan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2019 yang dilakukan antara lain:

1. Mengirim surat permintaan penyampaian laporan hasil inventarisasi dan laporan barang pengguna ke SKPD
2. Melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi laporan hasil inventarisasi dan laporan barang pengguna dengan SKPD
3. Memvalidasi Kartu Inventaris Barang dan laporan hasil inventarisasi serta laporan barang pengguna tahun berjalan secara manual maupun aplikasi aset.
4. Memvalidasi Perhitungan penyusutan dan ammortisasi Tahun berjalan secara manual maupun aplikasi aset.
5. Menyusun Panduan Praktis tahapan Penyusunan laporan hasil inventarisasi dan laporan barang pengguna SKPD
6. Pendampingan penyusunan laporan dan KIB SKPD
7. Pembinaan Akuntansi asset Tetap dan persediaan SKPD

Capaian Prosentase Tertib Pengelolaan BMD, sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian	
1.	Prosentase Tertib Pengelolaan BMD	30%	3%	10%	Kurang Berhasil

Dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jml	Satuan	Tahun 2019	
				Target	Realisasi
1.	Tanah				
	a. Belum bersertifikat	160	Bidang	48	1
	b. Tanah dibawah jalan belum dicatat dan dinilai	97	Unit	29	97
2.	Peralatan dan Mesin (Kendaraan)				
	a. Tidak diketahui Keberadaanya/ tidak berhak	90	Unit	27	0
	b. Rusak Berat	66	Unit	20	0
	c. dikuasai pihak lain/ pihak yang tidak berhak	16	Unit	5	5
	d. Hilang	19	Unit	6	0
	e. Dijual	2	Unit	1	2
	f. Terbakar	1	Unit	0	1
	g. Dihilangkan ke kelompok Masyarakat	7	Unit	2	7
3.	Peralatan dan Mesin (Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	4.446	Unit	1.334	1.112
4.	Gedung dan Bangunan				

	a. Dirobokan	4	Unit	1	0
	b. Dihilangkan ke masyarakat / pihak ketiga	19	Unit	6	19
5.	Jalan	4	Ruas	1	0
6.	Jembatan	3	Unit	1	0
7.	Jaringan	3	Unit	1	0
8.	Aset Tetap Lainnya (Barang bercorak kesenian/kebudayaan)	4	Buah	1	0
9.	Aset Tetap Lainnya (Buku)	131	Buah	39	0
	Jumlah	5.072		1.522	132

2.. Prosentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan

Penyusunan laporan realisasi penerimaan yang disusun menyajikan realisasi anggaran penerimaan berdasarkan basis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Melalui Penyusunan laporan realisasi penerimaan dapat dihasilkan informasi anggaran dan realisasi penerimaan daerah. Dari informasi tersebut dapat dilakukan perbandingan antara Penerimaan realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan Pendapatan Daerah. Perbandingan tersebut ditujukan untuk mengetahui sejauhmana tingkat pencapaian target target yang telah disepakati.

Laporan realisasi penerimaan disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan sumber pendapatan daerah yang telah dilaksanakan. Laporan realisasi penerimaan juga menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber penerimaan daerah yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

Tahapan Pelaksanaan pada tahun 2019 kegiatan ini adalah:

1. Menghimpun bahan dan data serta informasi harian
2. Melakukan penginputan data transaksi harian ke laporan realisasi penerimaan baik secara manual maupun aplikasi

3. Melakukan rekonsiliasi dengan SKPD pengelola sumber sumber pendapatan daerah
4. Finalisasi dan cetak laporan realisasi penerimaan Kabupaten Jayawijaya per bulan setiap awal bulan berikutnya
5. Menyampaikan laporan realisasi penerimaan Kabupaten Jayawijaya ke Stakeholder sebagai bahan pengambilan keputusan dan kebijakan

Pendapatan pada tahun 2019 yang sumber Penerimaan Daerah yang berasal dari :

1. Pendapatan Asli Daerah :
 - A. Pajak Daerah;
 - a. Pajak Restoran;
 - b. Pajak Hiburan;
 - c. Pajak Reklame;
 - d. Pajak Penerangan Jalan;
 - e. Pajak Air Tanah ;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
 - h. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Perkotaan
 - B. Retribusi Daerah
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu;
 - C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - a. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD.
 - D. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah
 - a. Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. Jasa Giro;
 - c. Pendapatan Bunga Deposito;
 - d. Pendapatan Denda Pajak;

- e. Pendapatan Denda Retribusi;
 - f. Pendapatan dari Pengembalian;
 - g. Lain-Lain Pendapatan;
 - h. Dana Kapitasi JKN pada FTKP;
2. Dana Perimbangan.
- A. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak
 - a. Bagi Hasil Pajak;
 - b. Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber daya Alam;
 - B. Dana Alokasi Umum.
 - a. Dana Alokasi Umum;
 - C. Dana Alokasi Khusus.
 - a. Dana Alokasi Khusus Reguler;
 - b. Dana Alokasi Khusus Afirmasi;
 - c. Dana Alokasi Khusus Penugasan;
 - d. Dana Alokasi Khusus Non Fisik;
3. Lain-Lain Pendapatan Yang sah.
- A. Pendapatan Hibah.
 - a. Pendapatan Hibah Dana Bos
 - B. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya.
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi;
 - C. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.
 - a. Dana Otonomi Khusus;
 - b. Dana Desa;
 - D. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya.
 - a. Bantuan Keuangan dari Provinsi

A. Prosentase Penetapan Potensi Pajak Daerah.

Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dalam DPA-SKPD Tahun Anggaran 2019 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Sesuai Peraturan Daerah No 2 Tahun 2011 tentang pajak Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai Tugas dalam pemungutan Pajak Daerah, sebagai berikut : Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan, Pajak Reklame, PBB dan BPHTB.

Tahapan penetapan potensi pajak daerah, sebagai berikut :

1. Pembuatan Surat Tugas Tim Pendataan Objek Pajak;
2. Melakukan tugas pendataan lapangan terhadap objek pajak daerah;
3. Melakukan pengolahan data objek Pajak untuk ditetapkan sebagai dasar Penetapan target;
4. Menghimpun data penetapan untuk persiapan rapat setiap bulan dan triwulannya.
5. Pelaksanaan Rapat evaluasi pendapatan dengan OPD yang mengelola pendapatan dengan Bidang Pengelolaan Pendapatan dan Bidang Akuntansi;
6. Penyusunan Proyeksi pendapatan untuk Tahun berikutnya melalui data yang tersedia pertumbuhan objek pajak.

Capaian Prosentase Penetapan Potensi Pajak Daerah, sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian	
1.	Prosentase Penetapan Potensi Pajak Daerah	18%	19,28	102,12	Sangat Berhasil

Capaian potensi penetapan objek Pajak Daerah tahun 2019 dengan penjelasan, sebagai berikut :

1. Pajak Penerangan Jalan sebanyak 18.045 OP;
2. Pajak Bumi dan Bangunan sebanyak 4.274 OP;
3. Pajak Air Tanah sebanyak 137 OP;
4. Pajak Restoran sebanyak 133 OP
5. Pajak Hotel sebanyak 64 OP;
6. Pajak Hiburan 11 OP;
7. Pajak reklame 225 OP;
8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebanyak 59 OP;
9. BPHTB sebanyak 192 OP.

B. Prosentase Realisasi Pajak Daerah.

Pajak Daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk memajukan daerah tersebut, antara lain dapat ditempuh suatu kebijaksanaan yang mewajibkan setiap orang untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Setiap daerah berhak mengurus rumah tangganya sendiri (otonom). Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah (melalui Perda) untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah

Untuk peningkatan pendapatan Pajak Daerah yang dikarenakan masih belum optimalnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah menjadi salah satu penyebab minimnya pendapatan asli daerah. Beberapa strategi perlu dilakukan, meliputi antara lain:

1. Sosialisasi Perda tentang Pajak dan retribusi Daerah
2. Optimalisasi pengawasan, pengendalian internal, dan pengkoordinasian pendapatan sesuai regulasi dibidang pajak dan retribusi daerah.
3. Pengembangan sistem informasi pendapatan.

Kendala dan hambatan dalam pemungutan Pajak Daerah, sbb :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak;
2. Kurangnya Sosialisasi masalah pajak dan retribusi;
3. Lemahnya penegakan hukum bagi para penunggak pajak;
4. Faktor keamanan ;
5. Pemungutan pajak belum dapat menjangkau seluruh Distrik dan Kampung;

Capaian Prosentase Realisasi Pajak Daerah, adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian	
1.	Prosentase Realisasi Pajak Daerah	18%	19.87%	110 %	Sangat baik

C. Prosentase Penagihan Piutang Pajak Daerah.

Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan

Nilai piutang pajak yang dicantumkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam SKPD yang hingga akhir periode pelaporan belum dilunasi oleh Wajib Bayar. Hal ini bisa didapat dengan melakukan inventarisasi SKPD yang hingga akhir periode belum dibayar oleh Wajib Bayar.

Piutang pajak yang sampai dengan akhir periode laporan keuangan belum dibayar oleh wajib pajak, sebagai berikut :

- a. Pajak Restoran;
- b. Pajak Reklame;
- c. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- d. Pajak Air Tanah;
- e. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Untuk rincian masing-masing piutang adalah sebagai berikut:

- a. Piutang Air tanah Rp. 479.616
- b. Piutang Minerba Rp. 83.332.013
- c. Piutang Reklame Rp. 10.882.200
- d. Piutang PBB-P2 Rp. 4.536.823.956

Capaian Prosentase Penagihan Piutang Pajak Daerah, adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian	
1.	Prosentase Penagihan Piutang Pajak Daerah	53%	53%	100%	Sangat Baik

3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran belanja yang dialokasikan pada tahun 2019 untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp 45.741.626.060.75 terdiri dari :

- Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 15.391.077.672.00
- Belanja Langsung sebesar Rp. 30.350.548.388.00

Realisasi dari anggaran belanja yang dialokasikan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp 43.393.460.140.00 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 45.741.626.069.75 atau terserap 94,87% Realisasi anggaran belanja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah akan diuraikan sebagai berikut :

1. Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung

Anggaran dan realisasi belanja tidak langsung yang telah dipertanggungjawabkan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Anggaran dan Realisasi Belanja tidak langsung

NO	URAIAN	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Sisa	Persentase %
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	15.391.077.673.00	14.849.100.123.00	541.977.550.00	96,47%

2. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung

Anggaran belanja langsung yang dialokasikan guna mendukung Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan tugas, pokok dan tata kerja selaras dengan wewenang yang dilimpahkan yaitu dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Kegiatan-kegiatan yang didanai dari anggaran belanja langsung yang dialokasikan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp 30.350.548.488.00 terealisasi sebesar Rp 28.544.360.017.00 atau terserap sebesar 94,04% Anggaran dan realisasi dari belanja langsung dengan rincian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			PERSENTASE (%)
		ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6
5.2.	BELANJA LANGSUNG				
4.20.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12.636.150.388,00	11.906.424.908,00	729.725.480,00	94,22
4.20.05.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.749.994.200,00	1.486.490.050,00	263.504.150,00	84,94
4.20.05.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.283.628.753,00	832.440.000,00	451.188.753,00	64,85
4.20.05.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	100
4.20.05.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	69.495.600,00	69.495.600,00	0,00	100
4.20.05.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	654.675.000,00	652.999.000,00	1.676.000,00	99,74
4.20.05.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.797.267.835,00	1.794.745.000,00	2.522.835,00	99,85
4.20.05.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	151.200.000,00	150.600.000,00	600.000,00	99,6
4.20.05.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	53.799.000,00	53.799.000,00	0,00	100
4.20.05.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	4.606.574.000,00	4.602.468.000,00	4.106.000,00	99,9
4.20.05.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1.807.516.000,00	1.801.388.258,00	6.127.742,00	99,6
4.20.05.01.19	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Survei Lapangan/ Monitoring Dalam Daerah	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	100
4.20.05.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.774.000.000,00	1.769.200.000,00	5.800.000,00	99,7
4.20.05.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	100

4.20.05.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	702.800.000,00	700.000.000,00	2.800.000,00	99,6
4.20.05.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung Kantor	173.200.000,00	173.200.000,00	0,00	100
4.20.05.02.42	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	800.000.000,00	797.000.000,00	3.000.000,00	99,6
4.20.05.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2.162.700.000,00	2.159.531.056,00	3.168.944,00	99,85
4.20.05.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	410.000.000,00	410.000.000,00	0,00	100
4.20.05.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	268.000.000,00	268.000.000,00	0,00	100
4.20.05.06.05	Penyusunan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.484.100.000,00	1.480.931.056,00	3.168.944,00	99,7
4.20.05.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset Daerah	13.776.698.000,00	12.709.204.053,00	1.067.493.947,00	92,25
	Penyusunan Analisa Standar Belanja				
4.20.05.15.02	Penyusunan Standar Satuan Harga	255.400.000,00	254.425.000,00	975.000,00	99,6
4.20.05.15.06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	767.356.000,00	766.680.100,00	675.900,00	99,9
4.20.05.15.08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	825.852.000,00	824.626.000,00	1.226.000,00	99,85
4.20.05.15.10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	748.584.000,00	745.915.658,00	2.668.342,00	99,6
4.20.05.15.13	Penyusunan Sistem informasi pengelolaan Keuangan daerah	2.350.000.000,00	2.347.315.000,00	2.685.000,00	99,88
4.20.05.15.16	Peningkatan manajemen asset/ barang daerah	2.697.975.000,00	2.085.902.339,00	612.072.661,00	77,3
4.20.05.15.18	Revaluasi/ appraisal asset/ barang daerah	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0
4.20.05.15.19	Intensifikasi dan Ektensifikasi sumber-sumber pendapatan	688.700.000,00	687.084.200,00	1.615.800,00	99,7
4.20.05.15.20	Penyusunan Pedoman Rencana Kerja dan Anggaran	362.500.000,00	262.416.000,00	84.000,00	72,39
4.20.05.15.21	Peningkatan Pengelolaan Gaji PNS	477.292.000,00	475.246.570,00	2.045.430,00	99,57
4.20.05.15.22	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Kas Daerah	843.958.000,00	843.460.000,00	498.000,00	99,9
4.20.05.15.23	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Daerah	299.935.000,00	299.935.000,00	0,00	100
4.20.05.15.24	Sosialisasi paket regulasi tentang pajak dan retribusi	407.338.000,00	382.388.000,00	0,00	100
4.20.05.15.25	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	497.750.000,00	492.931.186,00	4.818.814,00	99,03
4.20.05.15.26	Optimalisasi penagihan pajak/ piutang pajak daerah	731.664.000,00	731.662.700,00	1.300,00	99,9
4.20.05.15.27	Fasilitasi penatausahaan hibah/ bansos	895.894.000,00	893.343.000	2.551.000,00	99,7
4.20.05.15.28	Revisi Perda No 2 dan 3 tentang Pajak dan Retribusi	350.000.000,00	339.523.300,00	10.476.700,00	97
4.20.05.15.29	Penyusunan KUA, PPA, dan KUA Perubahan, PPA Perubahan	176.500.000,00	176.350.000,00	150.000,00	99,9

**Perbandingan Realisasi Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Tahun 2018 dengan Tahun 2019**

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019
Target	35.531.776.484,70	45.741.626.060,75
Realisasi	33.097.193.120,00	43.393.460.140,00
%	93,14%	94,87%

**Perbandingan Realisasi Anggaran Belanja tidak langsung Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 dengan Tahun 2019**

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019
Target	15.960.250.857,70	15.391.077.673,00
Realisasi	14.932.032.185,00	14.849.100.123,00
%	93,55%	96,47%

**Perbandingan Realisasi Anggaran Belanja langsung Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Tahun 2018 dengan Tahun 2019**

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019
Target	19.571.525.627,00	30.350.548.388,00
Realisasi	18.165.160.935,00	28.544.360.017,00
%	92,8%	94,04 %

3.5. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS

Laporan Kinerja (LKJ) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan dalam rangka mencapai sasaran atau tujuan yang ditetapkan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strateji yang ditetapkan selaras dengan kewenangan yang dimiliki dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah didukung dengan jumlah anggaran belanja sebesar Rp 45.741.626.060,75.00 terealisasi sebesar Rp 43.393.460.140.00 atau terserap sebesar 94,87%

Anggaran dan Realisasi Belanja
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2019

Kode	Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Presentase %
4.20.05.00	Belanja Tidak Langsung	15.391.077.673,00	14.849.100.123,00	96,47
4.20.05.01	Belanja Administrasi Perkantoran	1.749.994.200,00	1.486.490.050,00	84,94
4.20.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.775.000.000,00	1.769.200.000,00	99,67
4.20.05.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2.162.700.000,00	2.159.531.056,00	99,85
4.20.05.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	13.776.698.000,00	12.709.204.053,00	92,25

BAB IV

PENUTUP

4.1. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja (LKJ) merupakan manifestasi dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. Laporan sebagai Akuntabilitas merupakan media pertanggungjawaban yang berisikan informasi mengenai kinerja yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Jayawijaya.

Secara umum dari misi yang telah ditetapkan telah terlaksana dengan baik, hal ini terlihat dari hasil pengukuran pada tingkat sasaran yang rata-rata telah mencapai target yang diharapkan, keberhasilan ini juga telah didukung penuh oleh seluruh anggota organisasi.

Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2019 ini masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan terutama dalam menganalisa kinerja organisasi. Oleh karena itu masukan-masukan positif bagi penyempurnaan dan pengembangan Sistem Akuntabilitas Publik di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya sangat diperlukan sehingga implementasi sistem LKJ diharapkan akan lebih baik dimasa mendatang.


4.2. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

Secara umum kinerja terlaksana dengan baik, hal ini terlihat dari hasil pengukuran pada tingkat sasaran yang rata-rata telah mencapai target yang diharapkan, dan untuk lebih meningkatkan kinerja dimasa mendatang maka diperlukan strategi, sebagai berikut :

1. Peningkatan peraturan dan kebijakan daerah yang berkaitan dengan system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
2. Peningkatan tertib administrasi pengelolaan asset;

3. Peningkatan penerimaan pendapatan daerah melalui daya dukung sarana dan prasarana penyempurnaan peraturan yang berkaitan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
4. Peningkatan jumlah SDM yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan dan aset;
5. Peningkatan pelayanan yang mendukung dengan sarana dan prasarana yang berbasis sistem informasi.

Wamena, 2020

KEPALA BADAN

SEMUEL PATASIK, SPI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 1972071019941010



Lampiran 3.1

Capaian Kinerja Prosentase Dokumen RKA/ DPA sebanyak 69 SKPD

Kode Giat	Program/ Kegiatan	Sumber Dana	Anggaran Setelah Perubahan
	Dinas Pendidikan		
1.01.01.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	10.984.518.070
1.01.01.00.00	Belanja Tidak Langsung	DAK Non Fisik Tamsil Guru	546.000.000
1.01.01.00.00	Belanja Tidak Langsung	DAK Non Fisik Profesi Guru	12.374.770.000
1.01.01.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Tunjangan Khusus Guru	5.793.436.000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum	104.243.400
1.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum	18.000.000
1.01.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dana Alokasi Umum	88.047.000
1.01.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum	15.000.000
1.01.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dana Alokasi Umum	100.000.000
1.01.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dana Alokasi Umum	715.000.000
1.01.01.01.19	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Survei Lapangan/ Monitoring Dalam Daerah	Pendapatan Asli Daerah	50.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
1.01.01.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	Dana Bagi Hasil Pusat	14.000.000.000
1.01.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pendapatan Asli Daerah	82.500.000
1.01.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pendapatan Asli Daerah	212.452.000
1.01.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	29.000.000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
1.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Alokasi Umum	1.000.000
	Program Pendidikan Anak Usia Dini		
1.01.01.15.57	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	Dana Otsus Silpa	50.600.000
1.01.01.15.59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Dana Otonomi Khusus	1.147.500.000
1.01.01.15.62	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini	Dana Otonomi Khusus	-
1.01.01.15.67	Pelatihan bagi pendidik dalam penerapan pendidikan ramah anak	Dana Otsus Silpa	126.000.000
1.01.01.15.68	Pengadaan alat permainan edukatif indoor dan outdoor	Dana Otonomi Khusus	-
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		
1.01.01.16.01	Pembangunan gedung sekolah SD	Dana Otsus Silpa	1.036.000.000
1.01.01.16.02	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	DAK Fisik Afirmasi	2.278.547.000
1.01.01.16.03	Penambahan ruang kelas sekolah	DAK Fisik Reguler	2.868.600.000
1.01.01.16.14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	DAK Fisik Reguler	453.600.000
1.01.01.16.19	Pengadaan meubelair sekolah SD	Dana Otsus Silpa	560.000.000
1.01.01.16.44	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	DAK Fisik Reguler	3.439.800.000
1.01.01.16.57	Pelatihan kompetensi bagi tenaga pendidik SD	Dana Otonomi Khusus	-
1.01.01.16.58	Pelatihan kompetensi siswa berprestasi	Dana Otonomi Khusus	120.000.000
1.01.01.16.61	Pembinaan SMP terbuka	Dana Otonomi Khusus	-
1.01.01.16.62	Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB	DAK Fisik Reguler	1.827.000.000

1.01.01.16.65	Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS	DAK Fisik Reguler	401.437.000
1.01.01.16.69	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar	Dana Otsus Silpa	98.800.000
1.01.01.16.76	Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	Dana Otonomi Khusus	-
1.01.01.16.79	Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Siswa SD	Dana Otonomi Khusus	2.044.080.000
1.01.01.16.80	Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Siswa SMP	Dana Otonomi Khusus	811.728.000
1.01.01.16.81	Bantuan Operasional Sekolah SD	Dana BOS	11.800.378.317
1.01.01.16.82	Bantuan Operasional Sekolah SMP	Dana BOS	4.968.630.642
1.01.01.16.83	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru SMP	DAK Fisik Afirmasi	1.566.020.000
1.01.01.16.84	Pembangunan Laboratorium IPA	DAK Fisik Reguler	846.875.000
1.01.01.16.85	Pengadaan Peralatan Sekolah SMP	Dana Alokasi Umum	1.400.000.000
1.01.01.16.86	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SMP	DAK Fisik Reguler	1.058.400.000
1.01.01.16.87	Pelatihan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	Dana Otonomi Khusus	-
1.01.01.16.88	Pelatihan kompetensi siswa berprestasi SMP	Dana Otsus Silpa	42.075.000
1.01.01.16.89	Pembinaan kelembagaan pelaksanaan MBS dan pelatihan penyusunan RKA/RKAS SMP	Dana Otonomi Khusus	-
1.01.01.16.90	Penyelenggaraan akreditasi SMP	Dana Otonomi Khusus	-
	Program Pendidikan Non Formal		
1.01.01.18.01	Pemberdayaan tenaga pendidik non formal	Dana Otonomi Khusus	-
1.01.01.18.02	Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal	Dana Otonomi Khusus	-
1.01.01.18.04	Pengembangan pendidikan keaksaraan	Dana Otonomi Khusus	-
1.01.01.18.06	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	Dana Otsus Silpa	600.000.000
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
1.01.01.20.01	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Dana Otonomi Khusus	254.995.000
1.01.01.20.04	Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)	Dana Alokasi Umum	240.000.000
1.01.01.20.07	Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	Dana Alokasi Umum	750.000.000
1.01.01.20.08	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Dana Otonomi Khusus	-
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		
1.01.01.21.01	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	Dana Alokasi Umum	286.200.000
1.01.01.21.02	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	Dana Alokasi Umum	3.000.052.900
1.01.01.21.07	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Dana Alokasi Umum	228.068.500
1.01.01.21.10	Penyelenggaraan Ujian Akhir Nasional/Ujian Akhir Sekolah/Ujian Paket	Dana Otonomi Khusus	2.000.000.000
1.01.01.21.11	Fasilitas Tenaga Guru Kontrak Lokal	Dana Otonomi Khusus	-
	Dinas Kesehatan		
1.02.01.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	8.926.123.234
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1.02.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum	2.000.000
1.02.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum	112.140.000

1.02.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	42.000.000
1.02.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dana Alokasi Umum	289.200.000
1.02.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dana Alokasi Umum	92.500.000
1.02.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum	10.145.000
1.02.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Alokasi Umum	15.833.000
1.02.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pendapatan Asli Daerah	70.150.000
1.02.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dana Alokasi Umum	216.000.000
1.02.01.01.19	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Survei Lapangan/ Monitoring Dalam Daerah	Pendapatan Asli Daerah	49.500.000
1.02.01.01.21	Penyediaan Jasa Tenaga Medis	Dana Bagi Hasil Propinsi	5.597.400.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
1.02.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	84.632.000
1.02.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	60.005.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
1.02.01.05.05	Pertemuan Penyusunan Rencana Aksi Daerah HIV/AIDS	Dana Otonomi Khusus	76.300.000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
1.02.01.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Dana Alokasi Umum	15.700.000
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan		
1.02.01.15.01	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	DAK Fisik Reguler	3.319.647.000
1.02.01.15.02	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	Dana Otonomi Khusus	357.200.000
1.02.01.15.05	Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	DAK Fisik Penugasan	6.232.470.000
1.02.01.15.07	e-Logistik	DAK Non Fisik BOK Kesehatan	382.728.000
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		
1.02.01.16.01	Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas	Dana Otonomi Khusus	1.700.000.000
1.02.01.16.09	Peningkatan kesehatan masyarakat	Dana Kapitasi	17.446.535.755
1.02.01.16.16	BOK UKM Sekunder	DAK Non Fisik BOK Kesehatan	1.138.000.000
1.02.01.16.17	Dukungan Manajemen BOK Kabupaten dan Jampersa	DAK Non Fisik BOK Kesehatan	980.000.000
1.02.01.16.18	BOK Puskesmas	DAK Non Fisik BOK Kesehatan	13.752.000.000
1.02.01.16.19	Fasilitasi Sarana Prasarana Tenaga Kesehatan	Dana Bagi Hasil Pusat	96.000.000
	Program Pengawasan Obat dan Makanan		
1.02.01.17.02	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Dana Otonomi Khusus	20.075.000
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat		
1.02.01.19.02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Dana Otonomi Khusus	44.735.000
1.02.01.19.05	Pelatihan Kader Malaria	Dana Otonomi Khusus	-
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat		
1.02.01.20.02	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Dana Otonomi Khusus	-
1.02.01.20.07	Stunting	DAK Non Fisik BOK Kesehatan	750.000.000
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan		
1.02.01.23.07	Akreditasi Puskesmas	DAK Non Fisik BOK Akreditasi Pus	700.000.000
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/puskesmas Pembantu dan Jaringannya		
1.02.01.25.01	Pembangunan puskesmas	DAK Fisik Afirmasi	20.450.293.014

1.02.01.25.07	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	DAK Fisik Afirmasi	167.348.986
1.02.01.25.33	Pembangunan Puskesmas Rawat Inap (L)	Dana DAK Silpa	2.456.282.975
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak		
1.02.01.29.03	Pertolongan Persalinan Bagi Ibu Hamil dari keluarga Kurang Mampu	Dana Otonomi Khusus	-
1.02.01.29.04	Pertemuan Audit Material Perinatal (AMP)	Dana Otonomi Khusus	-
1.02.01.29.05	Jaminan Persalinan Normal (JAMPERSAL)	DAK Non Fisik BOK Jampersal	1.478.000.000
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		
1.02.01.30.01	Pengkajian Dampak Lingkungan	Dana Bagi Hasil Pusat	694.536.000
	Rumah Sakit Umum Daerah		
1.02.02.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	23.656.319.632
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1.02.02.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum	1.145.000.000
1.02.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum	564.000.000
1.02.02.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	22.528.000
1.02.02.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dana Alokasi Umum	1.050.000.000
1.02.02.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dana Alokasi Umum	204.566.000
1.02.02.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum	232.755.000
1.02.02.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Alokasi Umum	141.225.000
1.02.02.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dana Alokasi Umum	444.323.980
1.02.02.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Dana Alokasi Umum	302.000.000
1.02.02.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dana Alokasi Umum	238.470.000
1.02.02.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dana Alokasi Umum	264.600.000
1.02.02.01.20	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Dana Alokasi Umum	300.000.000
1.02.02.01.21	Penyediaan Jasa Tenaga Medis	Dana Alokasi Umum	6.656.718.750
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
1.02.02.02.10	Pengadaan Meubelair	Pendapatan Asli Daerah	148.590.000
1.02.02.02.12	Penyediaan jasa/sewa rumah jabatan dan perlengkapan Kantor	Dana Alokasi Umum	250.000.000
1.02.02.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	388.946.000
1.02.02.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	100.000.000
1.02.02.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pendapatan Asli Daerah	104.150.000
1.02.02.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	14.650.000
1.02.02.02.30	Pemeliharaan dan kalibrasi alat rutin kesehatan	Dana Bagi Hasil Pusat	150.000.000
1.02.02.02.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Air Bersih	Pendapatan Asli Daerah	754.600.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		
1.02.02.03.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Pendapatan Asli Daerah	85.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
1.02.02.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dana Alokasi Umum	239.875.000
	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata		

1.02.02.15.04	Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I,II,III)	DAK Fisik Penugasan	21.015.685.000
1.02.02.15.16	Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit	DAK Fisik Penugasan	2.925.000.000
1.02.02.15.18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	DAK Fisik Penugasan	21.244.089.980
1.02.02.15.19	Pengadaan obat-obatan rumah sakit	Dana Otonomi Khusus	2.986.865.455
1.02.02.15.22	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	Dana Bagi Hasil Pusat	100.800.000
1.02.02.15.23	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	Dana Otonomi Khusus	4.203.589.529
1.02.02.15.27	Pengadaan bahan medis pakai habis	Dana Bagi Hasil Pusat	2.714.541.125
1.02.02.15.28	Pengadaan bahan/reagen laboratorium	Dana Otonomi Khusus	505.633.528
1.02.02.15.29	Pembangunan ruang/gedung instalasi Central Sterile Service Departement (CSSD)	DAK Fisik Penugasan	6.922.928.020
1.02.02.15.30	Pembangunan Ruang Instalasi Gizi	Dana Alokasi Umum	5.000.000.000
1.02.02.15.37	Penyediaan Jasa Pengiriman Obat-obatan	Dana Bagi Hasil Pusat	1.300.000.000
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		
1.02.02.18.02	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	Dana Alokasi Umum	4.068.151.685
1.02.02.18.12	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Dana Alokasi Umum	464.450.000
1.02.02.18.16	Peningkatan kualitas pelayanan	Dana Otonomi Khusus	-
1.02.02.18.17	Peningkatan jasa pelayanan kesehatan masyarakat papua	Dana Kartu Papua Sehat (KPS)	10.017.225.000
1.02.02.18.18	Peningkatan Jasa Pelayanan Kesehatan Masyarakat Swasta	Pendapatan Asli Daerah	194.944.000
1.02.02.19.01	Akreditasi Rumah Sakit	DAK Non Fisik BOK Akreditasi RS	620.000.000
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.03.01.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	5.387.794.428
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1.03.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum	208.486.800
1.03.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	36.400.000
1.03.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dana Alokasi Umum	48.337.000
1.03.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum	21.860.000
1.03.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dana Alokasi Umum	72.000.000
1.03.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dana Alokasi Umum	450.000.000
1.03.01.01.19	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Survei Lapangan/ Monitoring Dalam Daerah	Dana Alokasi Umum	45.300.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
1.03.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pendapatan Asli Daerah	18.876.000
1.03.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	143.113.150
1.03.01.02.11	Pembangunan Pos Keamanan	Dana Alokasi Umum	1.800.000.000
1.03.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	36.400.000
1.03.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	-
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
1.03.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pendapatan Asli Daerah	10.544.000
1.03.01.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pendapatan Asli Daerah	10.276.000
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		

1.03.01.15.01	Perencanaan pembangunan jalan	Dana Alokasi Umum	734.061.000
1.03.01.15.03	Pembangunan jalan	DAK Fisik Reguler	17.701.238.000
1.03.01.15.05	Pembangunan jembatan	DAK Fisik Penugasan	15.000.000.000
1.03.01.15.07	Pembangunan Jalan Walesi - Walaik	Dana Otonomi Khusus	-
	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan		
1.03.01.18.06	Pemeliharaan jalan dalam kota	Dana Alokasi Umum	3.000.360.000
	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya		
1.03.01.24.01	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	Dana Bagi Hasil Pusat	310.592.000
1.03.01.24.08	Pembangunan pintu air	DAK Fisik Penugasan	11.954.876.000
	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah		
1.03.01.27.01	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	DAK Fisik Reguler	2.834.317.000
1.03.01.27.02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	DAK Fisik Afirmasi	5.731.663.000
1.03.01.27.10	Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat	DAK Fisik Reguler	2.072.164.000
1.03.01.27.23	Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Minum	Dana Bagi Hasil Pusat	154.411.000
	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan		
1.03.01.30.05	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan	Dana Otonomi Khusus	-
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
1.04.01.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	3.476.929.239
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1.04.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum	3.000.000
1.04.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Dana Bagi Hasil Propinsi	600.000
1.04.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dana Alokasi Umum	57.264.000
1.04.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum	15.000.000
1.04.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Alokasi Umum	8.450.000
1.04.01.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Dana Alokasi Umum	60.000.000
1.04.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dana Alokasi Umum	94.522.000
1.04.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dana Alokasi Umum	423.300.000
1.04.01.01.19	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Survei Lapangan/ Monitoring Dalam Daerah	Dana Alokasi Umum	103.250.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
1.04.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Bagi Hasil Propinsi	39.996.000
1.04.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	48.245.000
1.04.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	196.294.000
1.04.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	-
1.04.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	14.585.000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
1.04.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Alokasi Umum	9.960.000
1.04.01.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Pendapatan Asli Daerah	9.960.000
	Program Pengembangan Perumahan		
1.04.01.15.02	Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual (NSPM)	Dana Bagi Hasil Pusat	50.000.000

1.04.01.15.07	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Dana Otonomi Khusus	3.400.000.000
	Program pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah		
1.04.01.21.02	Sosialisasi sistem pendaftaran tanah	Dana Alokasi Umum	849.850.000
	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan		
1.04.01.22.02	Fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan	Pendapatan Asli Daerah	70.000.000
1.04.01.22.03	Pembebasan tanah pemerintah daerah	Dana Alokasi Umum	364.600.000
	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)		
1.04.01.23.01	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH	Dana Bagi Hasil Pusat	914.090.000
	Dinas Sosial		
1.13.01.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	2.693.847.533
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1.13.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum	104.243.400
1.13.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dana Alokasi Umum	51.299.000
1.13.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum	24.746.000
1.13.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dana Alokasi Umum	35.000.000
1.13.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dana Alokasi Umum	233.800.000
1.13.01.01.19	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Survei Lapangan/ Monitoring Dalam Daerah	Dana Alokasi Umum	78.150.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
1.13.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	100.542.000
1.13.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pendapatan Asli Daerah	10.000.000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
1.13.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pendapatan Asli Daerah	6.070.000
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lai		
1.13.01.15.03	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	Dana Otonomi Khusus	-
1.13.01.15.06	Dana Pendampingan penyaluran beras rastra ke KPM (Keluarga Penerima Manfaat)	Dana Otonomi Khusus	800.478.000
	Program pembinaan anak terlantar		
1.13.01.17.04	Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar	Dana Otonomi Khusus	-
	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma		
1.13.01.18.04	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Dana Otonomi Khusus	100.000.000
	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo		
1.13.01.19.04	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo	Dana Otonomi Khusus	-
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		
1.13.01.21.05	Operasional Penunjang Kegiatan Program Keluarga harapan	Dana Alokasi Umum	500.000.000
1.13.01.21.06	Operasional Penunjang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Dana Alokasi Umum	199.931.000
	Satuan Polisi Pamong Praja		

1.20.01.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	6.829.877.407
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1.20.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum	12.000.000
1.20.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Bagi Hasil Propinsi	14.000.000
1.20.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dana Alokasi Umum	100.000.000
1.20.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Alokasi Umum	10.000.000
1.20.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dana Alokasi Umum	10.000.000
1.20.01.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Dana Alokasi Umum	154.840.000
1.20.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dana Alokasi Umum	2.595.220.000
1.20.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dana Alokasi Umum	394.800.000
1.20.01.01.20	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Dana Alokasi Umum	7.319.160.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
1.20.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	10.000.000
1.20.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	74.994.050
1.20.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	100.000.000
1.20.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	49.985.000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
1.20.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Alokasi Umum	10.000.000
1.20.01.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Dana Alokasi Umum	5.000.000
1.20.01.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dana Alokasi Umum	5.000.000
	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal		
1.20.01.16.02	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Dana Bagi Hasil Pusat	249.993.000
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)		
1.20.01.18.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dana Alokasi Umum	199.540.000
	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran		
1.20.01.19.12	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Dana Alokasi Umum	210.000.000
	Dinas Perhubungan		
2.07.01.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	3.475.542.907
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
2.07.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum	1.221.173.000
2.07.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum	40.000.000
2.07.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Bagi Hasil Propinsi	31.500.000
2.07.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dana Alokasi Umum	45.130.800
2.07.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dana Alokasi Umum	108.543.000
2.07.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum	38.750.000
2.07.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dana Alokasi Umum	5.000.000
2.07.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dana Alokasi Umum	100.000.000

2.07.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dana Alokasi Umum	230.000.000
2.07.01.01.19	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Survei Lapangan/ Monitoring Dalam Daerah	Dana Alokasi Umum	40.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
2.07.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	148.700.000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
2.07.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Alokasi Umum	20.000.000
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		
2.07.01.15.09	Peningkatan pengelolaan Lapangan Terbang	Dana Otsus Silpa	-
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		
2.07.01.16.05	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana lalu lintas	Dana Bagi Hasil Pusat	50.000.000
	Program peningkatan pelayanan angkutan		
2.07.01.17.12	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	DAK Fisik Afirmasi	780.000.000
2.07.01.17.14	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Dana Bagi Hasil Propinsi	47.917.000
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan		
2.07.01.18.04	Pembangunan dan Pengadaan sarana dan prasarana	DAK Fisik Afirmasi	7.803.480.000
	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas		
2.07.01.19.01	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Dana Bagi Hasil Pusat	100.000.000
	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor		
2.07.01.20.03	Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	Pendapatan Asli Daerah	100.360.000
	Dinas Lingkungan Hidup		
2.08.01.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	3.406.253.688
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
2.08.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum	248.234.600
2.08.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum	29.040.000
2.08.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	39.700.000
2.08.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dana Alokasi Umum	54.216.000
2.08.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dana Alokasi Umum	39.944.000
2.08.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum	15.000.000
2.08.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Alokasi Umum	14.932.000
2.08.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dana Alokasi Umum	12.000.000
2.08.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dana Alokasi Umum	35.110.000
2.08.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dana Alokasi Umum	285.074.000
2.08.01.01.19	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Survei Lapangan/ Monitoring Dalam Daerah	Dana Alokasi Umum	30.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		

2.08.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	349.816.000
2.08.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	15.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
2.08.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendapatan Asli Daerah	120.000.000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
2.08.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Alokasi Umum	32.249.500
2.08.01.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Dana Alokasi Umum	2.400.000
2.08.01.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dana Alokasi Umum	499.500
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		
2.08.01.15.04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Dana Bagi Hasil Pusat	4.222.078.900
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		
2.08.01.16.07	Pengkajian dampak lingkungan	Dana Bagi Hasil Propinsi	399.097.000
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2.10.01.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	2.733.367.784
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
2.10.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum	39.747.800
2.10.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum	28.200.000
2.10.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	3.200.000
2.10.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dana Alokasi Umum	34.747.800
2.10.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dana Alokasi Umum	63.879.000
2.10.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum	24.704.000
2.10.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Alokasi Umum	10.745.000
2.10.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dana Alokasi Umum	19.778.000
2.10.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dana Alokasi Umum	311.516.000
2.10.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dana Alokasi Umum	361.950.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
2.10.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	36.000.000
2.10.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	13.481.000
2.10.01.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Dana Alokasi Umum	6.260.000
2.10.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	8.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
2.10.01.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	160.000.000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
2.10.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Alokasi Umum	28.800.000
	Program Penataan Administrasi Kependudukan		

2.10.01.15.03	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	676.862.400
2.10.01.15.06	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	305.950.000
2.10.01.15.08	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.226.490.000
2.10.01.15.10	Penyusunan kebijakan kependudukan	Dana Otonomi Khusus	-
2.10.01.15.11	Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	206.846.600
2.10.01.15.12	Sosialisasi kebijakan kependudukan	Dana Alokasi Umum	322.299.000
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana		
2.11.01.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	3.252.847.565
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
2.11.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum	104.243.400
2.11.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum	6.000.000
2.11.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	5.000.000
2.11.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dana Alokasi Umum	24.485.000
2.11.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum	7.000.000
2.11.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Alokasi Umum	6.000.000
2.11.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dana Alokasi Umum	30.000.000
2.11.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dana Alokasi Umum	249.500.000
2.11.01.01.19	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Survei Lapangan/ Monitoring Dalam Daerah	Dana Alokasi Umum	40.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
2.11.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	7.000.000
2.11.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	7.000.000
2.11.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	7.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
2.11.01.05.02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Dana Alokasi Umum	75.000.000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
2.11.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pendapatan Asli Daerah	10.000.000
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak		
2.11.01.16.08	Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak	Dana Otonomi Khusus	-
2.11.01.16.10	Fasilitas Kampung Ramah Anak	Dana Otonomi Khusus	-
2.11.01.16.11	Fasilitas Forum Anak	Dana Otonomi Khusus	50.000.000
2.11.01.17.10	Fasilitas Pencatatan dan Pelaporan KDRT	Dana Otonomi Khusus	-
	Program Keluarga Berencana		
2.11.01.20.01	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	Dana Otonomi Khusus	-
2.11.01.20.02	Pelayanan KIE	Dana Otonomi Khusus	-

2.11.01.20.07	Fasilitasi HARGANAS	Dana Alokasi Umum	50.000.000
2.11.01.20.08	Pembangunan / Alih Fungsi Pengembangan Balai Operasional KB	DAK Fisik Reguler	1.467.052.000
2.11.01.20.09	Bantuan Operasional KB (BOP KB)	DAK Non Fisik BOK KB	9.778.602.000
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja		
2.11.01.21.01	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Dana Otonomi Khusus	35.000.000
	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri		
2.11.01.23.02	Pembinaan dan peningkatan ekonomi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera	Dana Otonomi Khusus	-
	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat		
2.11.01.24.01	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Dana Alokasi Umum	50.000.000
	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS		
2.11.01.26.01	Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Dana Otonomi Khusus	50.000.000
	Program Pusat pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak		
2.11.01.30.01	Fasilitasi Rencana Aksi Daerah PPPA	Dana Otonomi Khusus	50.000.000
2.11.01.30.02	Pendampingan dan Pemenuhan Hak Anak	Dana Otonomi Khusus	-
	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan		
2.14.01.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	3.460.857.804
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
2.14.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum	3.497.000
2.14.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum	29.000.000
2.14.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Bagi Hasil Propinsi	6.200.000
2.14.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dana Alokasi Umum	104.243.400
2.14.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dana Alokasi Umum	79.990.000
2.14.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum	35.010.000
2.14.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dana Alokasi Umum	59.904.000
2.14.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dana Alokasi Umum	300.000.000
2.14.01.01.19	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Survei Lapangan/ Monitoring Dalam Daerah	Dana Alokasi Umum	49.756.600
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
2.14.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pendapatan Asli Daerah	2.093.000
2.14.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	53.498.000
2.14.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	20.000.000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
2.14.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Alokasi Umum	9.975.000
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		
2.14.01.15.01	Penyusunan data base tenaga kerja daerah	Dana Otonomi Khusus	-

2.14.01.15.06	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Dana Otonomi Khusus	-
	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi		
2.14.01.18.05	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	Dana Otonomi Khusus	-
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah		
2.14.01.19.01	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	DAK Fisik Reguler	1.500.000.000
2.14.01.19.02	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri	Dana Otonomi Khusus	-
2.14.01.19.06	Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta	Dana Otonomi Khusus	-
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri		
2.14.01.20.01	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Dana Otonomi Khusus	-
	Program Penataan Struktur Industri		
2.14.01.21.03	Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir	Dana Otonomi Khusus	-
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan		
2.14.01.23.02	Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	Pendapatan Asli Daerah	80.000.000
2.14.01.23.03	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Pendapatan Asli Daerah	150.000.000
2.14.01.23.04	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrelogian daerah	Pendapatan Asli Daerah	50.000.000
2.14.01.23.05	Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan	Pendapatan Asli Daerah	50.000.000
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri		
2.14.01.26.08	Pengembangan Pasar Daerah	DAK Fisik Penugasan	11.141.176.000
2.14.01.26.09	Pengelolaan Pasar Sentra Daerah	Pendapatan Asli Daerah	300.000.000
	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan		
2.14.01.27.01	Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan	Dana Otonomi Khusus	199.100.000
	Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
2.16.01.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	2.429.963.420
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
2.16.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum	159.693.400
2.16.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pendapatan Asli Daerah	24.000.000
2.16.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Bagi Hasil Propinsi	3.500.000
2.16.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dana Alokasi Umum	252.527.000
2.16.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Dana Alokasi Umum	74.258.000
2.16.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pendapatan Asli Daerah	6.665.000
2.16.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dana Alokasi Umum	92.552.000
2.16.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dana Alokasi Umum	470.800.000

2.16.01.01.19	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Survei Lapangan/ Monitoring Dalam Daerah	Dana Alokasi Umum	300.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
2.16.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pendapatan Asli Daerah	30.488.000
2.16.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pendapatan Asli Daerah	21.000.000
2.16.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pendapatan Asli Daerah	18.300.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
2.16.01.05.02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Dana Alokasi Umum	104.961.404
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
2.16.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Alokasi Umum	11.084.000
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		
2.16.01.15.10	Penyelenggaraan pameran investasi	Pendapatan Asli Daerah	28.333.334
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		
2.16.01.16.04	Pengembangan System Informasi Penanaman Modal	Pendapatan Asli Daerah	361.500.000
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		
2.16.01.19.06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Dana Otonomi Khusus	-
2.16.01.19.07	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD	Dana Otonomi Khusus	-
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		
2.16.01.21.05	Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Pendapatan Asli Daerah	26.855.500
2.16.01.21.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dana Alokasi Umum	58.050.500
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
2.17.01.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	3.091.144.285
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
2.17.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum	71.295.600
2.17.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dana Alokasi Umum	65.469.000
2.17.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum	208.358.000
2.17.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dana Alokasi Umum	4.650.000
2.17.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dana Alokasi Umum	38.400.000
2.17.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dana Alokasi Umum	392.000.000
2.17.01.01.19	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Survei Lapangan/ Monitoring Dalam Daerah	Dana Alokasi Umum	121.900.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
2.17.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	150.862.000
2.17.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pendapatan Asli Daerah	19.200.000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
2.17.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pendapatan Asli Daerah	340.000
	Program Pengembangan Nilai Budaya		

2.17.01.15.01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Dana Otonomi Khusus	-
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		
2.17.01.16.01	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Dana Otonomi Khusus	-
2.17.01.16.06	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Dana Otonomi Khusus	-
2.17.01.16.07	Pengembangan nilai dan geografi sejarah	Dana Otonomi Khusus	-
2.17.01.16.12	Pengelolaan karya cetak dan karya rekam	Pendapatan Asli Daerah	269.500.000
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya		
2.17.01.17.03	Penyelenggaraan dialog kebudayaan	Dana Otonomi Khusus	-
2.17.01.17.04	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	Dana Bagi Hasil Pusat	230.336.000
2.17.01.17.05	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Dana Otonomi Khusus	7.000.000.000
2.17.01.17.06	Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal	Dana Alokasi Umum	123.695.000
2.17.01.17.08	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Dana Alokasi Umum	3.000.000.000
	Program Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya		
2.17.01.18.02	Fasilitasi pembentukan kemitraan usaha profesi antar daerah	Dana Bagi Hasil Pusat	199.218.000
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		
2.17.01.20.08	Pengembangan Daya Tarik Wisata	DAK Fisik Reguler	7.529.929.000
2.17.01.20.09	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Kepariwisataaan	DAK Non Fisik Kepariwisataaan	558.580.000
	Dinas Olahraga dan Pemuda		
2.18.01.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	2.421.950.248
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
2.18.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum	4.000.000
2.18.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dana Alokasi Umum	40.000.000
2.18.01.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum	8.238.000
2.18.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dana Alokasi Umum	100.000.000
2.18.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dana Alokasi Umum	206.800.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
2.18.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	68.232.000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
2.18.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pendapatan Asli Daerah	10.000.000
2.18.01.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Dana Alokasi Umum	10.000.000
	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga		
2.18.01.16.06	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Dana Otsus Silpa	100.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga		
2.18.01.17.08	Pengadaan Alat-Alat Olahraga	Dana Otonomi Khusus	-
2.18.01.17.09	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	DAK Fisik Reguler	28.833.970.000
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan		
2.18.01.19.01	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Pendapatan Asli Daerah	800.787.900
2.18.01.19.02	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Dana Otonomi Khusus	-

2.18.01.19.10	Fasilitasi Gerakan Pramuka	Dana Bagi Hasil Pusat	300.030.000
	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba		
2.18.01.21.01	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	Dana Otonomi Khusus	-
2.21.01.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	3.183.339.501
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
2.21.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum	3.000.000
2.21.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum	19.800.000
2.21.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	6.000.000
2.21.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dana Alokasi Umum	24.000.000
2.21.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dana Alokasi Umum	25.681.000
2.21.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum	8.660.000
2.21.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Alokasi Umum	3.222.000
2.21.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dana Alokasi Umum	3.618.000
2.21.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dana Alokasi Umum	14.928.000
2.21.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dana Alokasi Umum	277.000.000
2.21.01.01.19	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Survei Lapangan/ Monitoring Dalam Daerah	Dana Alokasi Umum	55.400.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
2.21.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	6.750.000
2.21.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	43.100.000
2.21.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	7.250.000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
2.21.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Alokasi Umum	15.150.000
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan		
2.21.01.16.03	Analisa dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplay Pangan	Dana Alokasi Umum	77.800.000
2.21.01.16.09	Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	Dana Otonomi Khusus	-
2.21.01.16.12	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	Dana Otonomi Khusus	-
2.21.01.16.14	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Dana Otonomi Khusus	-
2.21.01.16.22	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Dana Otonomi Khusus	-
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung		
2.22.01.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	3.516.580.301
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
2.22.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum	72.225.600
2.22.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Bagi Hasil Propinsi	4.040.000
2.22.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dana Alokasi Umum	54.182.000
2.22.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum	50.580.000

2.22.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dana Alokasi Umum	40.050.000
2.22.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dana Alokasi Umum	259.900.000
2.22.01.01.19	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Survei Lapangan/ Monitoring Dalam Daerah	Dana Alokasi Umum	100.300.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
2.22.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pendapatan Asli Daerah	3.770.000
2.22.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	41.354.000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
2.22.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pendapatan Asli Daerah	10.282.000
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		
2.22.01.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Dana Alokasi Umum	150.072.000
2.22.01.15.02	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Dana Otonomi Khusus	-
	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan		
2.22.01.16.02	Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa	Dana Otonomi Khusus	-
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		
2.22.01.18.01	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan	Dana Bagi Hasil Pusat	150.089.000
2.22.01.18.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dana Alokasi Umum	500.462.000
2.22.01.18.05	Sosialisasi dan Fasilitasi Pemilihan, Pemberhentian dan Pelantikan Kepala Kampung	Dana Alokasi Umum	227.154.000
2.22.01.18.06	Pendamping Administrasi Proyek (PAP) Dana Kampung	Dana Alokasi Umum	200.000.000
2.22.01.18.07	Sosialisasi Pengelolaan Aset Kampung	Dana Alokasi Umum	50.515.000
2.22.01.18.08	Bulan Bhakti Gotong Royong/ Lomba Perkembangan Kampung	Dana Bagi Hasil Pusat	250.000.000
	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan		
2.22.01.19.01	Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	Dana Otsus Silpa	150.065.000
	Dinas Komunikasi dan Informatika		
2.25.01.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	2.904.717.253
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
2.25.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum	163.200.000
2.25.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum	4.199.150.000
2.25.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Bagi Hasil Propinsi	17.000.000
2.25.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dana Alokasi Umum	45.105.000
2.25.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum	9.689.500
2.25.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dana Alokasi Umum	14.998.000
2.25.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dana Alokasi Umum	60.000.000
2.25.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dana Alokasi Umum	491.375.800

2.25.01.01.19	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Survei Lapangan/ Monitoring Dalam Daerah	Dana Alokasi Umum	39.975.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
2.25.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	49.766.000
2.25.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	120.420.000
2.25.01.02.10	Pengadaan Meubelair	Dana Alokasi Umum	84.065.000
2.25.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	20.000.000
2.25.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pendapatan Asli Daerah	15.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
2.25.01.05.02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Dana Alokasi Umum	83.994.000
2.25.01.05.05	Sosialisasi Regulasi Bidang Persandian	Dana Alokasi Umum	280.000.000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
2.25.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pendapatan Asli Daerah	10.000.000
2.25.01.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pendapatan Asli Daerah	10.000.000
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		
2.25.01.15.02	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Dana Bagi Hasil Pusat	3.179.350.000
2.25.01.15.06	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Dana Alokasi Umum	107.946.000
	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi		
2.25.01.17.01	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Dana Alokasi Umum	150.000.000
	Program kerjasama informasi dan media massa		
2.25.01.18.03	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Dana Alokasi Umum	300.000.000
	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah		
2.25.01.19.01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Dana Bagi Hasil Propinsi	365.049.000
2.25.01.19.05	Penyusunan data informasi pembangunan, laju perkembangan perekonomian , analisa situasi pembangunan manusia	Dana Alokasi Umum	280.000.000
	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah		
2.26.01.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	2.395.729.944
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
2.26.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum	35.000.000
2.26.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum	7.000.000
2.26.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	6.000.000
2.26.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dana Alokasi Umum	30.029.000
2.26.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum	4.000.000
2.26.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dana Alokasi Umum	18.525.000
2.26.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dana Alokasi Umum	149.700.000
2.26.01.01.19	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Survei Lapangan/ Monitoring Dalam Daerah	Dana Alokasi Umum	30.000.000

	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
2.26.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	8.060.000
2.26.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	9.000.000
2.26.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	14.402.000
2.26.01.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	5.945.000
	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan		
2.26.01.15.01	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	Dana Alokasi Umum	250.000.000
2.26.01.15.09	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Dana Otonomi Khusus	100.000.000
	Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi		
2.26.01.19.03	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta	Dana Alokasi Umum	250.000.000
	Dinas Pertanian		
3.01.01.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	7.283.152.057
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
3.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum	663.600.000
3.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum	43.800.000
3.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	15.200.000
3.01.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dana Alokasi Umum	63.479.000
3.01.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum	38.735.000
3.01.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dana Alokasi Umum	6.708.000
3.01.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dana Alokasi Umum	50.000.000
3.01.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dana Alokasi Umum	397.906.000
3.01.01.01.19	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Survei Lapangan/ Monitoring Dalam Daerah	Dana Alokasi Umum	132.150.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
3.01.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	29.370.000
3.01.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	56.148.000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
3.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pendapatan Asli Daerah	9.458.000
	Program peningkatan kesejahteraan petani		
3.01.01.15.02	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis	Dana Otonomi Khusus	-
3.01.01.15.06	Fasilitasi Penyelenggaraan KTNA	Dana Otonomi Khusus	-
	Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan		
3.01.01.16.13	Pengembangan cadangan pangan daerah	Dana Otonomi Khusus	-
3.01.01.16.17	Pengembangan pertanian pada lahan kering	Dana Otonomi Khusus	-
3.01.01.16.20	Pengembangan perbenihan/perbibitan	Dana Otonomi Khusus	-
3.01.01.16.32	Pembukaan Lahan Tidur	Dana Otonomi Khusus	-

3.01.01.16.33	Penyediaan Tenaga Penyuluh	Dana Otonomi Khusus	-
	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan		
3.01.01.17.07	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah	Pendapatan Asli Daerah	80.000.000
	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan		
3.01.01.18.02	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	DAK Fisik Reguler	888.186.325
	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan		
3.01.01.19.03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Dana Otonomi Khusus	-
3.01.01.19.07	Rehabilitasi Kebun Kopi	Dana Otonomi Khusus	-
	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan		
3.01.01.20.04	Dukungan biaya operasional BPP dan penyuluh pertanian	Pendapatan Asli Daerah	157.257.000
3.01.01.20.05	Penyusunan program penyuluhan	Dana Bagi Hasil Pusat	49.137.000
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak		
3.01.01.21.02	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Dana Bagi Hasil Pusat	100.452.000
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan		
3.01.01.22.01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak	DAK Fisik Reguler	999.999.675
3.01.01.22.02	Pembibitan dan perawatan ternak	Dana Bagi Hasil Pusat	139.996.000
3.01.01.22.03	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Dana Otonomi Khusus	-
3.01.01.22.06	Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak	Dana Otonomi Khusus	200.000.000
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan		
3.01.01.24.05	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna	Dana Otonomi Khusus	-
	Dinas Perikanan		
3.05.01.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	3.064.446.120
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
3.05.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum	11.200.000
3.05.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum	-
3.05.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	5.183.000
3.05.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dana Alokasi Umum	75.600.000
3.05.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dana Alokasi Umum	39.723.000
3.05.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum	14.000.000
3.05.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Alokasi Umum	600.000
3.05.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dana Alokasi Umum	47.009.000
3.05.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dana Alokasi Umum	499.974.000
3.05.01.01.19	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Survei Lapangan/ Monitoring Dalam Daerah	Dana Alokasi Umum	263.925.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		

3.05.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	27.380.000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
3.05.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pendapatan Asli Daerah	11.000.000
	Program pengembangan budidaya perikanan		
3.05.01.20.02	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	Dana Otonomi Khusus	-
3.05.01.20.03	Pembinaan dan pengembangan perikanan	Dana Otsus Silpa	-
3.05.01.20.05	Rehabilitasi sarana dan prasarana pokok (UPTD) pembenihan	DAK Fisik Reguler	4.059.500.000
3.05.01.20.06	Promosi produksi dan hasil pengolahan perikanan	Dana Otonomi Khusus	-
3.05.01.20.14	Pengadaan sarana dan prasarana pembudidayaan usaha kecil masyarakat perikanan (nelayan dan Pembudidaya ikan)	DAK Fisik Reguler	981.452.000
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
4.06.01.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	4.325.350.412
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
4.06.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum	699.856.800
4.06.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum	26.400.000
4.06.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Bagi Hasil Propinsi	11.400.000
4.06.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dana Alokasi Umum	474.991.200
4.06.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dana Alokasi Umum	150.000.000
4.06.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum	50.000.000
4.06.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Alokasi Umum	5.500.000
4.06.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dana Alokasi Umum	30.000.000
4.06.01.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Dana Alokasi Umum	45.000.000
4.06.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dana Alokasi Umum	620.218.000
4.06.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dana Alokasi Umum	1.093.300.000
4.06.01.01.19	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Survei Lapangan/ Monitoring Dalam Daerah	Dana Alokasi Umum	56.675.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
4.06.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	50.000.000
4.06.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	63.600.000
4.06.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	49.910.000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
4.06.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pendapatan Asli Daerah	6.700.000
4.06.01.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Dana Alokasi Umum	10.000.000
	Program Pengembangan Data/Informasi		
4.06.01.15.01	Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	Dana Bagi Hasil Pusat	150.000.000
4.06.01.15.02	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Dana Bagi Hasil Pusat	247.950.000

4.06.01.15.06	Penyusunan analisa standar belanja	Dana Bagi Hasil Pusat	255.400.000
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah		
4.06.01.20.01	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	Dana Alokasi Umum	443.550.000
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		
4.06.01.21.07	Penetapan RPJMD	Dana Alokasi Umum	1.100.000.000
4.06.01.21.08	Penyusunan rancangan RKPD	Dana Alokasi Umum	400.000.000
4.06.01.21.14	Peningkatan Kemampuan Teknis Pengelolaan SIPPD	Dana Alokasi Umum	1.202.934.850
4.06.01.21.15	Fasilitasi Penyusunan RENSTRA OPD	Dana Alokasi Umum	150.000.000
4.06.01.21.16	Penyusunan URD/RD Dana OTSUS	Dana Otonomi Khusus	50.000.000
4.06.01.21.17	Penyusunan dan Penyampaian Laporan Pelaksanaan Penggunaan Dana Otsus (80%) Bagian Kab/Kota kepada Gubernur	Dana Otonomi Khusus	-
4.06.01.21.18	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program/Kegiatan Otsus 80% Bagian Kabupaten/Kota	Dana Otonomi Khusus	100.000.000
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi		
4.06.01.22.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perekonomian dan SDA	Dana Otonomi Khusus	-
4.06.01.22.09	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian dan Pariwisata	Dana Alokasi Umum	100.000.000
4.06.01.22.10	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian	Dana Alokasi Umum	100.000.000
4.06.01.22.11	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang pemberdayaan masyarakat koperasi dan UKM	Dana Alokasi Umum	100.000.000
	Program Perencanaan Sosial Budaya		
4.06.01.23.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sosial, budaya dan pemerintahan	Dana Otonomi Khusus	-
4.06.01.23.05	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang pendidikan dan Kebudayaan	Dana Alokasi Umum	200.000.000
4.06.01.23.06	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Aparatur Politik dan Hukum	Dana Alokasi Umum	100.000.000
4.06.01.23.07	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sosial dan Kesehatan	Dana Alokasi Umum	100.000.000
4.06.01.23.08	Perencanaan dan Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Dana Alokasi Umum	250.000.000
	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam		
4.06.01.24.03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang infrastruktur dan pengembangan kawasan	Dana Otonomi Khusus	-
4.06.01.24.04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informasi	Dana Alokasi Umum	100.000.000
4.06.01.24.05	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Dana Alokasi Umum	100.000.000
4.06.01.24.06	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Kewilayaan dan Penataan Ruang	Dana Alokasi Umum	100.000.000
	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK		
4.06.01.26.01	Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Kabupaten Jayawijaya	Dana Alokasi Umum	250.000.000
4.06.01.26.02	Penyusunan dan Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM/HDI)	Dana Alokasi Umum	300.000.000

	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
4.19.01.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	2.315.060.583
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
4.19.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum	37.747.800
4.19.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	5.300.000
4.19.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dana Alokasi Umum	22.295.000
4.19.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum	5.000.000
4.19.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dana Alokasi Umum	35.000.000
4.19.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dana Alokasi Umum	349.950.000
4.19.01.01.19	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Survei Lapangan/ Monitoring Dalam Daerah	Pendapatan Asli Daerah	50.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
4.19.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	19.500.000
4.19.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	2.000.000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
4.19.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pendapatan Asli Daerah	20.000.000
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan		
4.19.01.15.04	Koordinasi intelijen daerah secara terpadu	Dana Alokasi Umum	200.000.000
	Program Pendidikan Politik Masyarakat		
4.19.01.17.06	Pendataan Ormas, LSM dan Yayasan	Dana Alokasi Umum	100.000.000
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		
4.19.01.18.07	Pemantauan Pilpres dan Pileg	Dana Alokasi Umum	100.000.000
	Program ideologi pengembangan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa		
4.19.01.19.01	Sosialisasi Bela Negara	Dana Bagi Hasil Propinsi	144.963.000
	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		
4.20.01.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	16.738.186.436
	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
4.20.02.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	473.647.200
4.20.03.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	11.483.445.826
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
4.20.03.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum	1.214.190.600
4.20.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum	1.826.400.000
4.20.03.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	100.000.000
4.20.03.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dana Alokasi Umum	1.627.618.800
4.20.03.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dana Alokasi Umum	430.259.800
4.20.03.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum	1.703.742.000
4.20.03.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Alokasi Umum	254.917.000
4.20.03.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dana Alokasi Umum	262.926.487
4.20.03.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan	Dana Alokasi Umum	100.019.000
4.20.03.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Dana Alokasi Umum	192.940.000
4.20.03.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dana Alokasi Umum	17.035.334.000

4.20.03.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dana Alokasi Umum	1.918.381.000
4.20.03.01.19	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Survei Lapangan/ Monitoring Dalam Daerah	Dana Alokasi Umum	300.075.000
4.20.03.01.22	Pengelolaan Kebersihan dan Keamanan Gedung Otonom	Dana Alokasi Umum	1.272.381.200
4.20.03.01.23	Fasilitas Kantor Perwakilan Pemda di Sentani	Pendapatan Asli Daerah	898.673.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
4.20.03.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	1.800.000.000
4.20.03.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pendapatan Asli Daerah	969.508.000
4.20.03.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	1.139.323.000
4.20.03.02.10	Pengadaan Meubelair	Pendapatan Asli Daerah	679.838.000
4.20.03.02.11	Pengadaan Plakat Lambang Daerah	Dana Alokasi Umum	100.000.000
4.20.03.02.12	Pembelian Rumah Dinas/Jabatan	Dana Alokasi Umum	5.700.000.000
4.20.03.02.19	Penyediaan Jasa/Sewa Rumah Jabatan	Pendapatan Asli Daerah	250.000.000
4.20.03.02.20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Dana Alokasi Umum	300.000.000
4.20.03.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	150.000.000
4.20.03.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	2.734.582.000
4.20.03.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	136.000.000
4.20.03.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	32.000.000
4.20.03.02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	Dana Alokasi Umum	50.000.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		
4.20.03.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Dana Alokasi Umum	69.900.000
4.20.03.03.10	Pembuatan/Pengembangan/Pengelolaan Sistem Informasi Kinerja Elektronik	Pendapatan Asli Daerah	423.500.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
4.20.03.05.05	Bimtek Standar Pelayanan Publik	Dana Alokasi Umum	-
4.20.03.05.06	Fasilitas Penyusunan SOP Perangkat Daerah	Dana Bagi Hasil Pusat	199.900.000
4.20.03.05.07	Pelatihan Keprotokolan	Pendapatan Asli Daerah	249.575.000
4.20.03.05.21	Bimbingan Teknis Evaluasi Jabatan	Dana Bagi Hasil Pusat	170.000.000
4.20.03.05.23	Sosialisasi dan Diklat Pengadaan Barang/Jasa	Dana Bagi Hasil Pusat	227.614.000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
4.20.03.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Alokasi Umum	221.880.000
4.20.03.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Dana Alokasi Umum	361.625.000
4.20.03.06.05	Penyusunan LKPJ dan LPPD	Dana Alokasi Umum	399.999.000
4.20.03.06.06	Penyusunan SPM	Dana Alokasi Umum	99.900.000
	Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah		
4.20.03.15.01	Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat	Dana Alokasi Umum	53.810.470.000
4.20.03.15.02	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri	Dana Alokasi Umum	3.420.723.000
4.20.03.15.03	Rapat koordinasi unsur MUSPIDA	Dana Alokasi Umum	3.248.748.000
4.20.03.15.05	Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah	Dana Alokasi Umum	1.138.000.000

4.20.03.15.06	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Dana Alokasi Umum	1.404.087.000
4.20.03.15.07	Fasilitasi Stabilitas Daerah	Pendapatan Asli Daerah	5.949.000.000
	Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi		
4.20.03.16.02	Fasilitasi Pokja Pengadaan Barang / Jasa	Pendapatan Asli Daerah	2.757.877.600
	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat		
4.20.03.17.02	Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah Masalah Daerah	Pendapatan Asli Daerah	149.959.000
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah		
4.20.03.18.02	Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi	Pendapatan Asli Daerah	199.925.000
4.20.03.18.04	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana publik	Dana Alokasi Umum	96.484.000
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan		
4.20.03.19.01	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	Dana Alokasi Umum	708.500.000
4.20.03.19.02	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Dana Alokasi Umum	250.000.000
4.20.03.19.03	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Dana Alokasi Umum	400.001.000
4.20.03.19.04	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Dana Alokasi Umum	199.364.000
4.20.03.19.05	Publikasi peraturan perundang-undangan	Dana Bagi Hasil Pusat	155.792.000
4.20.03.19.06	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan yg baru, lebih tinggi dr keserasian antar peraturan daerah	Dana Alokasi Umum	200.000.000
4.20.03.19.07	Penataan Kelembagaan Daerah	Pendapatan Asli Daerah	150.050.000
	Program Penataan Daerah Otonomi Baru		
4.20.03.20.03	Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah	Dana Bagi Hasil Pusat	399.995.600
	Program kerjasama informasi dan media massa		
4.20.03.21.02	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Dana Bagi Hasil Pusat	1.599.984.000
4.20.03.21.04	Koordinasi Protokol se Provinsi Papua	Dana Alokasi Umum	-
	Program Kerjasama Pembangunan		
4.20.03.22.01	Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan	Dana Bagi Hasil Pusat	235.325.000
4.20.03.22.06	Penyelenggaraan Pameran Pembangunan	Pendapatan Asli Daerah	-
4.20.03.22.07	Pentas Seni Budaya, Lomba Cipta dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Pendapatan Asli Daerah	1.200.284.100
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota		
4.20.03.23.06	Fasilitasi tim anggaran pemerintah daerah	Pendapatan Asli Daerah	4.200.000.000
	Program Pengembangan Data/Informasi		
4.20.03.24.06	Fasilitasi Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE)	Dana Bagi Hasil Pusat	350.095.600
	Program Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		
4.20.03.25.09	Pendataan dan Penyusunan Pengendalian Kebijakan	Dana Alokasi Umum	100.000.000
4.20.03.25.10	Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Distrik	Dana Alokasi Umum	37.140.000

4.20.03.25.11	Evaluasi Kinerja dan Rapat Kerja Distrik	Dana Alokasi Umum	83.090.600
	Program Peningkatan Sistem Informasi dan Teknologi Manajemen Pengadaan Barang/Jasa		
4.20.03.26.01	Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Barang/Jasa	Dana Alokasi Umum	-
4.20.03.26.02	Peningkatan dan Pemeliharaan Hardware dan Software Sistem Informasi Pengadaan Secara Elektronik	Dana Alokasi Umum	241.450.000
	Sekretariat DPRD		
4.20.04.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	2.997.665.718
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
4.20.04.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Bagi Hasil Pusat	3.600.000
4.20.04.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum	109.999.400
4.20.04.01.04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Pendapatan Asli Daerah	150.000.000
4.20.04.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dana Alokasi Umum	504.000.000
4.20.04.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dana Alokasi Umum	150.000.000
4.20.04.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum	445.600.000
4.20.04.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pendapatan Asli Daerah	50.000.000
4.20.04.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dana Alokasi Umum	2.000.000.000
4.20.04.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dana Alokasi Umum	850.000.000
4.20.04.01.19	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Survei Lapangan/ Monitoring Dalam Daerah	Dana Alokasi Umum	50.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
4.20.04.02.10	Pengadaan Meubelair	Dana Alokasi Umum	120.000.000
4.20.04.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	100.000.000
4.20.04.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pendapatan Asli Daerah	165.000.000
4.20.04.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	5.000.000.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		
4.20.04.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Dana Alokasi Umum	417.500.000
	Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah		
4.20.04.15.01	Pembahasan rancangan peraturan daerah Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama	Dana Alokasi Umum	-
4.20.04.15.02	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Dana Alokasi Umum	750.000.000
4.20.04.15.03	Rapat-rapat paripurna	Dana Alokasi Umum	4.506.113.600
4.20.04.15.04	Kegiatan Reses	Dana Alokasi Umum	3.344.500.000
4.20.04.15.05	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Dana Alokasi Umum	18.000.000.000
4.20.04.15.06	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Dana Alokasi Umum	2.000.000.000
4.20.04.15.07		Dana Alokasi Umum	9.377.028.000
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
4.20.05.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	15.391.077.673
4.20.05.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	119.710.054.200
4.20.05.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Otonomi Khusus	25.007.708.000

4.20.05.00.00	Belanja Tidak Langsung	Pendapatan Asli Daerah	5.165.973.142
4.20.05.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Bagi Hasil Pusat	1.100.000.000
4.20.05.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Bantuan Keuangan Provinsi	31.462.448.000
4.20.05.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Otsus Silpa	500.000.000
4.20.05.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Desa	280.676.060.000
4.20.05.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Kartu Papua Sehat (KPS)	-
4.20.05.00.00	Belanja Tidak Langsung	DAK Non Fisik BOP PAUD	924.000.000
4.20.05.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana BOS	11.084.388.250
4.20.05.00.00	Belanja Tidak Langsung	DAK Non Fisik BOP Kesetaraan	1.820.600.000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
4.20.05.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum	1.749.994.200
4.20.05.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum	1.283.628.753
4.20.05.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	62.000.000
4.20.05.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dana Alokasi Umum	69.495.600
4.20.05.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dana Alokasi Umum	654.675.000
4.20.05.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum	1.797.267.835
4.20.05.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Alokasi Umum	151.200.000
4.20.05.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dana Alokasi Umum	53.799.000
4.20.05.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dana Alokasi Umum	4.606.574.000
4.20.05.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dana Alokasi Umum	1.807.516.000
4.20.05.01.19	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Survei Lapangan/ Monitoring Dalam Daerah	Dana Alokasi Umum	400.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
4.20.05.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	99.000.000
4.20.05.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	702.800.000
4.20.05.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	173.200.000
4.20.05.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Pendapatan Asli Daerah	800.000.000
4.20.05.05.02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Dana Alokasi Umum	-
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
4.20.05.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Alokasi Umum	410.600.000
4.20.05.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Dana Alokasi Umum	268.000.000
4.20.05.06.05	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPKD	Dana Alokasi Umum	1.484.100.000
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		
4.20.05.15.02	Penyusunan standar satuan harga	Pendapatan Asli Daerah	255.400.000
4.20.05.15.06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Pendapatan Asli Daerah	767.356.000
4.20.05.15.08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Pendapatan Asli Daerah	825.852.000
4.20.05.15.10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Pendapatan Asli Daerah	748.584.000
4.20.05.15.13	Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Pendapatan Asli Daerah	2.350.000.000
4.20.05.15.16	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	Dana Bagi Hasil Propinsi	2.697.975.000

4.20.05.15.18	Revaluasi/ appraisal aset/ barang daerah	Pendapatan Asli Daerah	400.000.000
4.20.05.15.19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Pendapatan Asli Daerah	688.700.000
4.20.05.15.20	Penyusunan Pedoman Rencana Kerja dan Anggaran	Pendapatan Asli Daerah	362.500.000
4.20.05.15.21	Peningkatan Pengelolaan Gaji PNS	Pendapatan Asli Daerah	477.292.000
4.20.05.15.22	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Kas Daerah	Pendapatan Asli Daerah	843.958.000
4.20.05.15.23	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pendapatan Asli Daerah	299.935.000
4.20.05.15.24	Sosialisasi paket regulasi tentang pajak dan retribusi daerah	Pendapatan Asli Daerah	407.338.000
4.20.05.15.25	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pendapatan Asli Daerah	497.750.000
4.20.05.15.26	Optimalisasi penagihan pajak/piutang pajak daerah	Pendapatan Asli Daerah	731.664.000
4.20.05.15.27	Fasilitasi penatausahaan hibah/bansos	Pendapatan Asli Daerah	895.894.000
4.20.05.15.28	Revisi Perda No. 2 dan No. 3 Tentang Pajak dan Retribusi	Dana Bagi Hasil Propinsi	350.000.000
4.20.05.15.29	Penyusunan KUA, PPA dan KUA Perubahan, PPA Perubahan	Pendapatan Asli Daerah	176.500.000
	Inspektorat		
4.20.06.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	3.438.632.864
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
4.20.06.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum	4.000.000
4.20.06.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum	16.200.000
4.20.06.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	8.900.000
4.20.06.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dana Alokasi Umum	31.200.000
4.20.06.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dana Alokasi Umum	70.000.000
4.20.06.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum	30.000.000
4.20.06.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Alokasi Umum	9.999.000
4.20.06.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dana Alokasi Umum	11.990.000
4.20.06.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dana Alokasi Umum	170.000.000
4.20.06.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dana Alokasi Umum	450.820.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
4.20.06.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pendapatan Asli Daerah	10.000.000
4.20.06.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pendapatan Asli Daerah	75.596.000
4.20.06.02.10	Pengadaan Meubelair	Dana Alokasi Umum	10.000.000
4.20.06.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	30.000.000
4.20.06.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	33.000.000
4.20.06.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	15.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
4.20.06.05.02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Dana Bagi Hasil Pusat	59.750.000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
4.20.06.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Alokasi Umum	13.450.000

	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		
4.20.06.15.01	Review RPJMD	Dana Alokasi Umum	207.000.000
4.20.06.15.03	Review Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dan PPKD	Dana Bagi Hasil Pusat	44.150.000
4.20.06.15.04	Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum	65.000.000
4.20.06.15.05	Review Lapkin Kabupaten	Dana Alokasi Umum	26.250.000
4.20.06.15.06	Review Penyerapan Anggaran	Dana Alokasi Umum	78.000.000
4.20.06.15.08	Review Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan DAK	Dana Alokasi Umum	195.000.000
4.20.06.15.09	Pemeriksaan Reguler OPD	Dana Alokasi Umum	1.300.000.000
4.20.06.15.12	Pemeriksaan Dana OTSUS	Dana Otonomi Khusus	100.000.000
4.20.06.15.13	Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Dana Bagi Hasil Pusat	87.250.000
4.20.06.15.14	Evaluasi LAKIP OPD	Dana Alokasi Umum	85.000.000
4.20.06.15.16	Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP	Dana Alokasi Umum	69.750.000
4.20.06.15.17	Monitoring dan Evaluasi Dana Desa	Dana Bagi Hasil Pusat	260.000.000
4.20.06.15.20	Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar	Dana Alokasi Umum	670.980.000
4.20.06.15.23	Penanganan Pengaduan Masyarakat	Dana Bagi Hasil Pusat	244.002.000
4.20.06.15.25	Penanganan Laporan Gratifikasi	Dana Bagi Hasil Pusat	48.000.000
4.20.06.15.28	Verifikasi LHKPN	Dana Alokasi Umum	33.000.000
4.20.06.15.31	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Dana Alokasi Umum	76.750.000
4.20.06.15.32	Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tingkat Provinsi	Dana Alokasi Umum	150.000.000
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan		
4.20.06.16.01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturnya	Dana Alokasi Umum	570.000.000
4.20.06.16.02	Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	Dana Alokasi Umum	80.000.000
4.20.06.16.03	Penilaian Penetapan Angka Kredit Auditor	Dana Bagi Hasil Pusat	9.000.000
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
4.20.07.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	3.775.762.121
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
4.20.07.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum	15.000.000
4.20.07.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum	50.000.000
4.20.07.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	16.456.000
4.20.07.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dana Alokasi Umum	69.495.600
4.20.07.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dana Alokasi Umum	100.000.000
4.20.07.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum	23.006.000
4.20.07.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Alokasi Umum	10.000.000
4.20.07.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dana Alokasi Umum	50.803.000
4.20.07.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dana Alokasi Umum	87.093.000
4.20.07.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dana Alokasi Umum	500.900.000
4.20.07.01.19	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Survei Lapangan/ Monitoring Dalam Daerah	Dana Alokasi Umum	50.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
4.20.07.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	378.946.000

4.20.07.02.10	Pengadaan Meubelair	Dana Alokasi Umum	40.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan		
4.20.07.02.24	Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	71.544.000
4.20.07.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Pendapatan Asli Daerah	35.000.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		
4.20.07.03.06	Fasilitasi Kegiatan KORPRI Jayawijaya	Dana Alokasi Umum	893.846.350
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
4.20.07.05.02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Dana Bagi Hasil Pusat	100.000.000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar		
4.20.07.06.01	Realisasi Kinerja SKPD	Dana Alokasi Umum	15.000.000
4.20.07.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Dana Alokasi Umum	15.000.000
4.20.07.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dana Alokasi Umum	15.000.000
	Program Pendidikan Kedinasan		
4.20.07.15.07	Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	Dana Alokasi Umum	200.000.000
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		
4.20.07.16.02	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah	Dana Alokasi Umum	2.995.500.000
4.20.07.16.04	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah	Dana Alokasi Umum	200.000.000
4.20.07.16.05	Pendidikan dan pelatihan Training Of Fasilitator	Dana Bagi Hasil Pusat	200.000.000
4.20.07.16.13	Pendidikan dan Pelatihan Struktural PIM Tingkat II	Dana Bagi Hasil Pusat	102.200.000
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		
4.20.07.17.02	Seleksi penerimaan calon PNS	Dana Bagi Hasil Pusat	200.000.000
	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS		
4.20.07.17.04		Dana Alokasi Umum	400.000.000
	Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah		
4.20.07.17.05		Dana Bagi Hasil Pusat	500.000.000
4.20.07.17.11	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Dana Alokasi Umum	900.000.000
4.20.07.17.12	Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN	Dana Alokasi Umum	57.000.000
4.20.07.17.13	Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan	Dana Alokasi Umum	200.000.000
4.20.07.17.17	Pengurusan Proses Pensiun PNS	Dana Alokasi Umum	150.000.000
4.20.07.17.18	Pengurusan Karpeg, Karis/Karsu dan Taspen	Dana Alokasi Umum	100.000.000
	Peningkatan Kualitas Data dan Informasi Kepegawaian		
4.20.07.18.01	Pemutakhiran data kepegawaian	Dana Alokasi Umum	80.800.000
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
4.20.08.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	1.825.375.466
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
4.20.08.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum	10.686.950
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan		
4.20.08.01.06	Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	-
4.20.08.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dana Alokasi Umum	34.747.800
4.20.08.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dana Alokasi Umum	25.919.000
4.20.08.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum	10.805.000

4.20.08.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dana Alokasi Umum	4.953.000
4.20.08.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dana Alokasi Umum	19.950.000
4.20.08.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dana Alokasi Umum	303.282.250
4.20.08.01.19	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Survei Lapangan/ Monitoring Dalam Daerah	Dana Alokasi Umum	100.300.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
4.20.08.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	23.462.000
4.20.08.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	-
4.20.08.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	9.520.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		
4.20.08.03.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Dana Alokasi Umum	31.088.000
4.20.08.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Dana Alokasi Umum	15.600.000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
4.20.08.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Alokasi Umum	9.680.000
4.20.08.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Dana Alokasi Umum	5.550.000
4.20.08.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dana Alokasi Umum	5.750.000
	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam		
4.20.08.15.01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Dana Bagi Hasil Pusat	153.082.800
4.20.08.15.04	Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara	Dana Bagi Hasil Pusat	84.747.800
	Distrik Wamena		
4.20.09.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	33.608.312.214
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
4.20.09.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum	37.108.000
4.20.09.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum	6.000.000
4.20.09.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dana Alokasi Umum	48.000.000
4.20.09.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dana Alokasi Umum	15.000.000
4.20.09.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum	5.000.000
4.20.09.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Alokasi Umum	6.000.000
4.20.09.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dana Alokasi Umum	10.000.000
4.20.09.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dana Alokasi Umum	10.000.000
4.20.09.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dana Alokasi Umum	37.000.000
4.20.09.01.19	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Survei Lapangan/ Monitoring Dalam Daerah	Dana Alokasi Umum	50.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
4.20.09.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	10.000.000
4.20.09.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	6.000.000
4.20.09.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	12.000.000

	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		
4.20.09.15.08	Kerjasama pengelolaan persampahan	Dana Bagi Hasil Pusat	363.000.000
4.20.09.15.13	Fasilitas Pemeliharaan Kebersihan Kota	Dana Alokasi Umum	1.851.500.000
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		
4.20.09.18.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dana Alokasi Umum	47.892.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		
4.20.09.22.01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wamena Kota	Dana Alokasi Umum	1.102.630.000
4.20.09.22.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sinapuk	Dana Alokasi Umum	1.102.630.000
4.20.09.22.03	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sinakma	Dana Alokasi Umum	1.102.630.000
	Distrik Kurulu		
4.20.10.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	12.430.621.974
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
4.20.10.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum	3.000.000
4.20.10.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum	2.500.000
4.20.10.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dana Alokasi Umum	25.000.000
4.20.10.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dana Alokasi Umum	5.000.000
4.20.10.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dana Alokasi Umum	121.500.000
4.20.10.01.19	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Survei Lapangan/ Monitoring Dalam Daerah	Dana Alokasi Umum	20.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
4.20.10.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	32.000.000
4.20.10.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	13.000.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		
4.20.10.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Dana Alokasi Umum	8.000.000
4.20.10.03.06	Pelaksanaan HUT RI Di Distrik	Dana Alokasi Umum	46.000.000
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		
4.20.10.18.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dana Alokasi Umum	17.000.000
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		
4.20.10.21.14	Penyelenggaraan Musrenbang Distrik	Dana Alokasi Umum	7.000.000
	Distrik Asologaima		
4.20.11.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	6.844.706.905
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
4.20.11.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum	3.000.000
4.20.11.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dana Alokasi Umum	24.000.000
4.20.11.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dana Alokasi Umum	30.000.000
4.20.11.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Dana Alokasi Umum	3.000.000
4.20.11.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dana Alokasi Umum	40.000.000

4.20.11.01.19	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Survei Lapangan/ Monitoring Dalam Daerah	Dana Alokasi Umum	20.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
4.20.11.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	50.000.000
4.20.11.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	40.000.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		
4.20.11.03.06	Pelaksanaan HUT RI Di Distrik	Dana Alokasi Umum	30.000.000
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		
4.20.11.18.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dana Alokasi Umum	30.000.000
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		
4.20.11.21.14	Penyelenggaraan Musrenbang Distrik	Dana Alokasi Umum	30.000.000
	Distrik Hubikosi		
4.20.12.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	9.364.992.151
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
4.20.12.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum	1.000.000
4.20.12.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dana Alokasi Umum	58.440.000
4.20.12.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dana Alokasi Umum	32.605.000
4.20.12.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum	16.885.000
4.20.12.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dana Alokasi Umum	35.000.000
4.20.12.01.19	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Survei Lapangan/ Monitoring Dalam Daerah	Dana Alokasi Umum	30.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
4.20.12.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	30.000.000
4.20.12.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	20.470.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		
4.20.12.03.06	Pelaksanaan HUT RI Di Distrik	Dana Alokasi Umum	36.600.000
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		
4.20.12.18.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dana Alokasi Umum	27.000.000
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		
4.20.12.21.14	Penyelenggaraan Musrenbang Distrik	Dana Alokasi Umum	12.000.000
	Distrik Bolakme		
4.20.13.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	5.513.607.031
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
4.20.13.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum	1.000.000
4.20.13.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dana Alokasi Umum	29.220.000
4.20.13.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dana Alokasi Umum	18.585.000
4.20.13.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum	11.885.000
4.20.13.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dana Alokasi Umum	60.220.000
4.20.13.01.19	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Survei Lapangan/ Monitoring Dalam Daerah	Dana Alokasi Umum	40.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
4.20.13.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	30.000.000
4.20.13.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	20.490.000

	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		
4.20.13.03.06	Pelaksanaan HUT RI Di Distrik	Dana Alokasi Umum	43.600.000
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		
4.20.13.18.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dana Alokasi Umum	35.000.000
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		
4.20.13.21.14	Penyelenggaraan Musrenbang Distrik	Dana Alokasi Umum	10.000.000
	Distrik Asolokobal		
4.20.14.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	8.079.079.329
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
4.20.14.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum	1.000.000
4.20.14.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum	2.000.000
4.20.14.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	2.500.000
4.20.14.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dana Alokasi Umum	16.000.000
4.20.14.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dana Alokasi Umum	18.602.000
4.20.14.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum	12.000.000
4.20.14.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dana Alokasi Umum	30.000.000
4.20.14.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dana Alokasi Umum	20.800.000
4.20.14.01.19	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Survei Lapangan/ Monitoring Dalam Daerah	Dana Alokasi Umum	38.898.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
4.20.14.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	20.000.000
4.20.14.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	26.000.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		
4.20.14.03.06	Pelaksanaan HUT RI Di Distrik	Dana Alokasi Umum	37.200.000
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		
4.20.14.18.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dana Alokasi Umum	55.000.000
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		
4.20.14.21.14	Penyelenggaraan Musrenbang Distrik	Dana Alokasi Umum	20.000.000
	Distrik Walelagama		
4.20.15.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	5.813.292.786
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
4.20.15.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum	1.000.000
4.20.15.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	3.000.000
4.20.15.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dana Alokasi Umum	6.000.000
4.20.15.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dana Alokasi Umum	20.000.000
4.20.15.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum	5.000.000
4.20.15.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dana Alokasi Umum	15.000.000
4.20.15.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dana Alokasi Umum	20.000.000
4.20.15.01.19	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Survei Lapangan/ Monitoring Dalam Daerah	Dana Alokasi Umum	20.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
4.20.15.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	15.000.000

4.20.15.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	5.200.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		
4.20.15.03.06	Pelaksanaan HUT RI Di Distrik	Dana Alokasi Umum	66.000.000
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		
4.20.15.18.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dana Alokasi Umum	80.000.000
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		
4.20.15.21.14	Penyelenggaraan Musrenbang Distrik	Dana Alokasi Umum	43.800.000
	Distrik Musatfak		
4.20.16.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	5.043.368.568
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
4.20.16.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum	1.000.000
4.20.16.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dana Alokasi Umum	26.000.000
4.20.16.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dana Alokasi Umum	20.000.000
4.20.16.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum	9.000.000
4.20.16.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Dana Alokasi Umum	5.200.000
4.20.16.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dana Alokasi Umum	30.000.000
4.20.16.01.19	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Survei Lapangan/ Monitoring Dalam Daerah	Dana Alokasi Umum	20.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
4.20.16.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	20.000.000
4.20.16.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	8.000.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		
4.20.16.03.06	Pelaksanaan HUT RI Di Distrik	Dana Alokasi Umum	45.000.000
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		
4.20.16.18.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dana Alokasi Umum	75.000.000
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		
4.20.16.21.14	Penyelenggaraan Musrenbang Distrik	Dana Alokasi Umum	40.800.000
	Distrik Wollo		
4.20.17.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	3.537.964.914
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
4.20.17.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum	1.000.000
4.20.17.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dana Alokasi Umum	58.440.000
4.20.17.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dana Alokasi Umum	18.701.000
4.20.17.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum	10.445.000
4.20.17.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dana Alokasi Umum	30.000.000
4.20.17.01.19	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Survei Lapangan/ Monitoring Dalam Daerah	Dana Alokasi Umum	31.440.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
4.20.17.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	20.000.000
4.20.17.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	19.530.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		
4.20.17.03.06	Pelaksanaan HUT RI Di Distrik	Dana Alokasi Umum	39.600.000
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		

4.20.17.18.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dana Alokasi Umum	56.094.000
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		
4.20.17.21.14	Penyelenggaraan Musrenbang Distrik	Dana Alokasi Umum	14.750.000
	Distrik Pelebaga		
4.20.18.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	6.120.312.299
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
4.20.18.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum	510.000
4.20.18.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dana Alokasi Umum	48.000.000
4.20.18.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dana Alokasi Umum	20.440.000
4.20.18.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum	10.500.000
4.20.18.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Dana Alokasi Umum	4.500.000
4.20.18.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dana Alokasi Umum	25.000.000
4.20.18.01.19	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Survei Lapangan/ Monitoring Dalam Daerah	Dana Alokasi Umum	30.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
4.20.18.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	20.000.000
4.20.18.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	8.000.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		
4.20.18.03.06	Pelaksanaan HUT RI Di Distrik	Dana Alokasi Umum	35.000.000
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		
4.20.18.18.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dana Alokasi Umum	63.050.000
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		
4.20.18.21.14	Penyelenggaraan Musrenbang Distrik	Dana Alokasi Umum	35.000.000
4.20.19.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	4.541.047.916
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
4.20.19.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum	4.000.000
4.20.19.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dana Alokasi Umum	58.440.000
4.20.19.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dana Alokasi Umum	20.221.000
4.20.19.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum	9.750.000
4.20.19.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dana Alokasi Umum	40.866.000
4.20.19.01.19	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Survei Lapangan/ Monitoring Dalam Daerah	Dana Alokasi Umum	37.640.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
4.20.19.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	20.000.000
4.20.19.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	24.733.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		
4.20.19.03.06	Pelaksanaan HUT RI Di Distrik	Dana Alokasi Umum	39.600.000
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		
4.20.19.18.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dana Alokasi Umum	30.000.000
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		
4.20.19.21.14	Penyelenggaraan Musrenbang Distrik	Dana Alokasi Umum	14.750.000
	Distrik Trikora		
4.20.20.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	722.076.792

	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
4.20.20.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum	500.000
4.20.20.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dana Alokasi Umum	16.000.000
4.20.20.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dana Alokasi Umum	10.000.000
4.20.20.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dana Alokasi Umum	30.000.000
4.20.20.01.19	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Survei Lapangan/ Monitoring Dalam Daerah	Dana Alokasi Umum	35.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
4.20.20.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	60.000.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		
4.20.20.03.06	Pelaksanaan HUT RI Di Distrik	Dana Alokasi Umum	70.000.000
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		
4.20.20.18.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dana Alokasi Umum	68.500.000
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		
4.20.20.21.14	Penyelenggaraan Musrenbang Distrik	Dana Alokasi Umum	10.000.000
	Distrik Napua		
4.20.21.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	3.028.361.493
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
4.20.21.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum	2.000.000
4.20.21.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum	3.000.000
4.20.21.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	2.000.000
4.20.21.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dana Alokasi Umum	24.000.000
4.20.21.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dana Alokasi Umum	10.000.000
4.20.21.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Alokasi Umum	1.000.000
4.20.21.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dana Alokasi Umum	5.000.000
4.20.21.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Dana Alokasi Umum	4.000.000
4.20.21.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dana Alokasi Umum	5.000.000
4.20.21.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dana Alokasi Umum	40.000.000
4.20.21.01.19	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Survei Lapangan/ Monitoring Dalam Daerah	Dana Alokasi Umum	50.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
4.20.21.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	2.000.000
4.20.21.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	4.000.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		
4.20.21.03.06	Pelaksanaan HUT RI Di Distrik	Dana Alokasi Umum	80.000.000
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		
4.20.21.18.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dana Alokasi Umum	58.000.000
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		
4.20.21.21.14	Penyelenggaraan Musrenbang Distrik	Dana Alokasi Umum	10.000.000
	Distrik Walaik		
4.20.22.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	1.032.230.203
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
4.20.22.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum	1.000.000

4.20.22.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dana Alokasi Umum	24.000.000
4.20.22.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dana Alokasi Umum	10.000.000
4.20.22.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dana Alokasi Umum	10.000.000
4.20.22.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dana Alokasi Umum	55.000.000
4.20.22.01.19	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Survei Lapangan/ Monitoring Dalam Daerah	Dana Alokasi Umum	60.000.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		
4.20.22.03.06	Pelaksanaan HUT RI Di Distrik	Dana Alokasi Umum	50.000.000
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		
4.20.22.18.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dana Alokasi Umum	70.000.000
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		
4.20.22.21.14	Penyelenggaraan Musrenbang Distrik	Dana Alokasi Umum	20.000.000
	Distrik Wouma		
4.20.23.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	2.450.995.883
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
4.20.23.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	1.150.000
4.20.23.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dana Alokasi Umum	24.000.000
4.20.23.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dana Alokasi Umum	13.321.000
4.20.23.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dana Alokasi Umum	10.000.000
4.20.23.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dana Alokasi Umum	30.000.000
4.20.23.01.19	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Survei Lapangan/ Monitoring Dalam Daerah	Dana Alokasi Umum	50.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
4.20.23.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	10.000.000
4.20.23.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	30.000.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		
4.20.23.03.06	Pelaksanaan HUT RI Di Distrik	Dana Alokasi Umum	71.000.000
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		
4.20.23.18.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dana Alokasi Umum	50.529.000
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		
4.20.23.21.14	Penyelenggaraan Musrenbang Distrik	Dana Alokasi Umum	10.000.000
	Distrik Hubikiak		
4.20.24.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	8.469.542.916
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
4.20.24.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum	14.000.000
4.20.24.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum	2.940.000
4.20.24.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dana Alokasi Umum	15.000.000
4.20.24.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Alokasi Umum	2.000.000
4.20.24.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dana Alokasi Umum	35.000.000
4.20.24.01.19	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Survei Lapangan/ Monitoring Dalam Daerah	Dana Alokasi Umum	120.561.300
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		

4.20.24.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	3.000.000
4.20.24.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	7.000.000
4.20.24.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	19.000.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		
4.20.24.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Dana Alokasi Umum	14.500.000
4.20.24.03.06	Pelaksanaan HUT RI Di Distrik	Dana Alokasi Umum	35.850.000
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		
4.20.24.18.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dana Alokasi Umum	22.148.700
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		
4.20.24.21.14	Penyelenggaraan Musrenbang Distrik	Dana Alokasi Umum	9.000.000
	Distrik Ibele		
4.20.25.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	1.841.657.369
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
4.20.25.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum	1.000.000
4.20.25.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dana Alokasi Umum	29.220.000
4.20.25.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dana Alokasi Umum	9.715.000
4.20.25.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dana Alokasi Umum	6.925.000
4.20.25.01.19	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Survei Lapangan/ Monitoring Dalam Daerah	Dana Alokasi Umum	15.295.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
4.20.25.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	5.000.000
4.20.25.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	10.800.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		
4.20.25.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Dana Alokasi Umum	21.748.000
4.20.25.03.06	Pelaksanaan HUT RI Di Distrik	Dana Alokasi Umum	94.240.000
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		
4.20.25.18.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dana Alokasi Umum	96.057.000
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		
4.20.25.21.14	Penyelenggaraan Musrenbang Distrik	Dana Alokasi Umum	10.000.000
	Distrik Tailarek		
4.20.26.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	1.236.336.474
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
4.20.26.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum	1.000.000
4.20.26.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dana Alokasi Umum	58.440.000
4.20.26.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dana Alokasi Umum	23.327.000
4.20.26.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Dana Alokasi Umum	14.500.000
4.20.26.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dana Alokasi Umum	16.431.000
4.20.26.01.19	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Survei Lapangan/ Monitoring Dalam Daerah	Dana Alokasi Umum	20.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
4.20.26.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	30.000.000
4.20.26.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	26.952.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		
4.20.26.03.06	Pelaksanaan HUT RI Di Distrik	Dana Alokasi Umum	49.600.000

	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		
4.20.26.18.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dana Alokasi Umum	45.000.000
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		
4.20.26.21.14	Penyelenggaraan Musrenbang Distrik	Dana Alokasi Umum	14.750.000
	Distrik Itlay Hisage		
4.20.27.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	2.244.943.384
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
4.20.27.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum	1.000.000
4.20.27.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dana Alokasi Umum	58.440.000
4.20.27.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dana Alokasi Umum	23.023.000
4.20.27.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum	13.000.000
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		
4.20.27.01.18		Dana Alokasi Umum	26.250.000
	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Survei Lapangan/ Monitoring Dalam Daerah		
4.20.27.01.19		Dana Alokasi Umum	18.885.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
4.20.27.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	15.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		
4.20.27.02.24		Dana Alokasi Umum	31.302.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		
4.20.27.03.06	Pelaksanaan HUT RI Di Distrik	Dana Alokasi Umum	54.600.000
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		
4.20.27.18.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dana Alokasi Umum	48.000.000
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		
4.20.27.21.14	Penyelenggaraan Musrenbang Distrik	Dana Alokasi Umum	10.500.000
	Distrik Siepkosi		
4.20.28.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	3.735.645.360
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
4.20.28.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum	1.000.000
4.20.28.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dana Alokasi Umum	25.200.000
4.20.28.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dana Alokasi Umum	15.089.000
4.20.28.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum	8.000.000
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		
4.20.28.01.18		Dana Alokasi Umum	20.000.000
	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Survei Lapangan/ Monitoring Dalam Daerah		
4.20.28.01.19		Dana Alokasi Umum	60.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
4.20.28.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	10.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		
4.20.28.02.24		Dana Alokasi Umum	30.000.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		
4.20.28.03.06	Pelaksanaan HUT RI Di Distrik	Dana Alokasi Umum	59.911.000
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		
4.20.28.18.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dana Alokasi Umum	63.000.000
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		
4.20.28.21.14	Penyelenggaraan Musrenbang Distrik	Dana Alokasi Umum	7.800.000
	Distrik Usilimo		

4.20.29.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	2.349.291.540
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
4.20.29.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum	1.000.000
4.20.29.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dana Alokasi Umum	58.440.000
4.20.29.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dana Alokasi Umum	30.804.000
4.20.29.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dana Alokasi Umum	20.000.000
4.20.29.01.19	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Survei Lapangan/ Monitoring Dalam Daerah	Dana Alokasi Umum	18.326.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
4.20.29.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	14.180.000
4.20.29.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	14.150.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		
4.20.29.03.06	Pelaksanaan HUT RI Di Distrik	Dana Alokasi Umum	59.600.000
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		
4.20.29.18.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dana Alokasi Umum	58.000.000
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		
4.20.29.21.14	Penyelenggaraan Musrenbang Distrik	Dana Alokasi Umum	25.500.000
	Distrik Wita Waya		
4.20.30.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	1.722.689.493
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
4.20.30.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum	1.000.000
4.20.30.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum	3.000.000
4.20.30.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dana Alokasi Umum	24.000.000
4.20.30.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dana Alokasi Umum	5.050.000
4.20.30.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dana Alokasi Umum	12.950.000
4.20.30.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dana Alokasi Umum	150.000.000
4.20.30.01.19	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Survei Lapangan/ Monitoring Dalam Daerah	Dana Alokasi Umum	10.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
4.20.30.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	7.000.000
4.20.30.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	10.000.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		
4.20.30.03.06	Pelaksanaan HUT RI Di Distrik	Dana Alokasi Umum	62.000.000
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		
4.20.30.18.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dana Alokasi Umum	15.000.000
	Distrik Libarek		
4.20.31.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	1.694.662.173
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
4.20.31.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum	1.000.000
4.20.31.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dana Alokasi Umum	58.440.000
4.20.31.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dana Alokasi Umum	24.876.000
4.20.31.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Dana Alokasi Umum	9.500.000
4.20.31.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dana Alokasi Umum	35.000.000

4.20.31.01.19	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Survei Lapangan/ Monitoring Dalam Daerah	Dana Alokasi Umum	35.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
4.20.31.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	20.000.000
4.20.31.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	23.800.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		
4.20.31.03.06	Pelaksanaan HUT RI Di Distrik	Dana Alokasi Umum	57.384.000
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		
4.20.31.18.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dana Alokasi Umum	25.000.000
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		
4.20.31.21.14	Penyelenggaraan Musrenbang Distrik	Dana Alokasi Umum	10.000.000
	Distrik Wadangku		
4.20.32.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	1.011.712.342
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
4.20.32.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum	1.000.000
4.20.32.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	2.000.000
4.20.32.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dana Alokasi Umum	48.000.000
4.20.32.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dana Alokasi Umum	17.000.000
4.20.32.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum	9.500.000
4.20.32.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dana Alokasi Umum	20.000.000
4.20.32.01.19	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Survei Lapangan/ Monitoring Dalam Daerah	Dana Alokasi Umum	40.500.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
4.20.32.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	20.748.000
4.20.32.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	18.000.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		
4.20.32.03.06	Pelaksanaan HUT RI Di Distrik	Dana Alokasi Umum	60.252.000
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		
4.20.32.18.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dana Alokasi Umum	38.000.000
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		
4.20.32.21.14	Penyelenggaraan Musrenbang Distrik	Dana Alokasi Umum	25.000.000
	Distrik Pisugi		
4.20.33.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	1.167.487.714
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
4.20.33.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum	1.000.000
4.20.33.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	2.000.000
4.20.33.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dana Alokasi Umum	24.000.000
4.20.33.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dana Alokasi Umum	20.960.000
4.20.33.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dana Alokasi Umum	30.000.000
4.20.33.01.19	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Survei Lapangan/ Monitoring Dalam Daerah	Dana Alokasi Umum	30.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		

4.20.33.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	20.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan		
4.20.33.02.24	Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	18.000.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		
4.20.33.03.06	Pelaksanaan HUT RI Di Distrik	Dana Alokasi Umum	55.040.000
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		
4.20.33.18.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dana Alokasi Umum	64.000.000
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		
4.20.33.21.14	Penyelenggaraan Musrenbang Distrik	Dana Alokasi Umum	35.000.000
	Distrik Koragi		
4.20.34.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	971.482.687
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
4.20.34.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum	1.000.000
4.20.34.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dana Alokasi Umum	24.000.000
4.20.34.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dana Alokasi Umum	19.949.000
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		
4.20.34.01.18		Dana Alokasi Umum	31.000.000
	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Survei Lapangan/ Monitoring Dalam Daerah		
4.20.34.01.19		Dana Alokasi Umum	20.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
4.20.34.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	2.612.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan		
4.20.34.02.24	Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	29.089.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		
4.20.34.03.06	Pelaksanaan HUT RI Di Distrik	Dana Alokasi Umum	62.500.000
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		
4.20.34.18.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dana Alokasi Umum	67.850.000
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		
4.20.34.21.14	Penyelenggaraan Musrenbang Distrik	Dana Alokasi Umum	42.000.000
	Distrik Tagime		
4.20.35.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	2.812.409.017
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
4.20.35.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum	1.000.000
4.20.35.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dana Alokasi Umum	36.000.000
4.20.35.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dana Alokasi Umum	33.621.000
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		
4.20.35.01.18		Dana Alokasi Umum	65.000.000
	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Survei Lapangan/ Monitoring Dalam Daerah		
4.20.35.01.19		Dana Alokasi Umum	30.554.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
4.20.35.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	10.500.000
4.20.35.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	10.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan		
4.20.35.02.24	Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	20.000.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		
4.20.35.03.06	Pelaksanaan HUT RI Di Distrik	Dana Alokasi Umum	40.000.000
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		
4.20.35.18.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dana Alokasi Umum	38.325.000

	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		
4.20.35.21.14	Penyelenggaraan Musrenbang Distrik	Dana Alokasi Umum	15.000.000
	Distrik Molagalome		
4.20.36.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	1.246.697.605
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
4.20.36.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum	1.000.000
4.20.36.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dana Alokasi Umum	58.440.000
4.20.36.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dana Alokasi Umum	32.620.000
4.20.36.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum	10.250.000
4.20.36.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dana Alokasi Umum	21.635.000
4.20.36.01.19	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Survei Lapangan/ Monitoring Dalam Daerah	Dana Alokasi Umum	10.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
4.20.36.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	19.855.000
4.20.36.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	31.312.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		
4.20.36.03.06	Pelaksanaan HUT RI Di Distrik	Dana Alokasi Umum	37.600.000
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		
4.20.36.18.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dana Alokasi Umum	66.663.000
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		
4.20.36.21.14	Penyelenggaraan Musrenbang Distrik	Dana Alokasi Umum	10.625.000
	Distrik Tagineri		
4.20.37.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	1.963.804.165
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
4.20.37.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum	1.000.000
4.20.37.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dana Alokasi Umum	58.440.000
4.20.37.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dana Alokasi Umum	33.510.000
4.20.37.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum	11.250.000
4.20.37.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dana Alokasi Umum	35.239.000
4.20.37.01.19	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Survei Lapangan/ Monitoring Dalam Daerah	Dana Alokasi Umum	10.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
4.20.37.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	20.000.000
4.20.37.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	19.936.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		
4.20.37.03.06	Pelaksanaan HUT RI Di Distrik	Dana Alokasi Umum	44.600.000
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		
4.20.37.18.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dana Alokasi Umum	50.900.000
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		
4.20.37.21.14	Penyelenggaraan Musrenbang Distrik	Dana Alokasi Umum	15.125.000
	Distrik Silo Karno Doga		
4.20.38.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	2.634.250.449
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
4.20.38.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum	1.000.000

4.20.38.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dana Alokasi Umum	36.000.000
4.20.38.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dana Alokasi Umum	20.000.000
4.20.38.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dana Alokasi Umum	20.000.000
4.20.38.01.19	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Survei Lapangan/ Monitoring Dalam Daerah	Dana Alokasi Umum	48.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
4.20.38.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	25.000.000
4.20.38.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	10.000.000
4.20.38.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	20.000.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		
4.20.38.03.06	Pelaksanaan HUT RI Di Distrik	Dana Alokasi Umum	60.000.000
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		
4.20.38.18.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dana Alokasi Umum	50.000.000
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		
4.20.38.21.14	Penyelenggaraan Musrenbang Distrik	Dana Alokasi Umum	10.000.000
	Distrik Piramid		
4.20.39.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	3.777.442.674
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
4.20.39.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum	2.000.000
4.20.39.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	10.000.000
4.20.39.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dana Alokasi Umum	24.000.000
4.20.39.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dana Alokasi Umum	19.258.000
4.20.39.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum	7.250.000
4.20.39.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dana Alokasi Umum	24.492.000
4.20.39.01.19	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Survei Lapangan/ Monitoring Dalam Daerah	Dana Alokasi Umum	15.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
4.20.39.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	20.000.000
4.20.39.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	24.000.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		
4.20.39.03.06	Pelaksanaan HUT RI Di Distrik	Dana Alokasi Umum	108.500.000
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		
4.20.39.18.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dana Alokasi Umum	33.000.000
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		
4.20.39.21.14	Penyelenggaraan Musrenbang Distrik	Dana Alokasi Umum	12.500.000
	Distrik Muliama		
4.20.40.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	2.865.011.532
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
4.20.40.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum	2.000.000
4.20.40.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dana Alokasi Umum	12.000.000
4.20.40.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dana Alokasi Umum	21.148.000
4.20.40.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum	25.000.000
4.20.40.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Alokasi Umum	5.000.000

4.20.40.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Dana Alokasi Umum	6.000.000
4.20.40.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dana Alokasi Umum	24.000.000
4.20.40.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dana Alokasi Umum	49.451.000
4.20.40.01.19	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Survei Lapangan/ Monitoring Dalam Daerah	Dana Alokasi Umum	25.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
4.20.40.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	14.400.000
4.20.40.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	25.000.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		
4.20.40.03.06	Pelaksanaan HUT RI Di Distrik	Dana Alokasi Umum	48.000.000
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		
4.20.40.18.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dana Alokasi Umum	25.000.000
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		
4.20.40.21.14	Penyelenggaraan Musrenbang Distrik	Dana Alokasi Umum	18.001.000
	Distrik Bugi		
4.20.41.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	1.901.014.859
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
4.20.41.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum	1.000.000
4.20.41.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dana Alokasi Umum	8.000.000
4.20.41.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dana Alokasi Umum	22.288.000
4.20.41.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum	7.400.000
4.20.41.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dana Alokasi Umum	20.000.000
4.20.41.01.19	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Survei Lapangan/ Monitoring Dalam Daerah	Dana Alokasi Umum	10.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
4.20.41.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	10.000.000
4.20.41.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	5.700.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		
4.20.41.03.06	Pelaksanaan HUT RI Di Distrik	Dana Alokasi Umum	17.500.000
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		
4.20.41.18.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dana Alokasi Umum	173.112.000
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		
4.20.41.21.14	Penyelenggaraan Musrenbang Distrik	Dana Alokasi Umum	25.000.000
	Distrik Bpiri		
4.20.42.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	1.113.353.143
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
4.20.42.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum	1.000.000
4.20.42.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dana Alokasi Umum	8.000.000
4.20.42.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dana Alokasi Umum	16.150.000
4.20.42.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dana Alokasi Umum	20.000.000
4.20.42.01.19	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Survei Lapangan/ Monitoring Dalam Daerah	Dana Alokasi Umum	30.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		

4.20.42.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	10.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan		
4.20.42.02.24	Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	10.000.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		
4.20.42.03.06	Pelaksanaan HUT RI Di Distrik	Dana Alokasi Umum	50.038.000
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		
4.20.42.18.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dana Alokasi Umum	134.812.000
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		
4.20.42.21.14	Penyelenggaraan Musrenbang Distrik	Dana Alokasi Umum	20.000.000
	Distrik Welesi		
4.20.43.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	1.737.500.638
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
4.20.43.01.02	Listrik	Dana Alokasi Umum	12.000.000
4.20.43.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dana Alokasi Umum	12.000.000
4.20.43.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dana Alokasi Umum	15.000.000
4.20.43.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum	6.000.000
4.20.43.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Dana Alokasi Umum	4.002.000
4.20.43.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dana Alokasi Umum	16.000.000
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		
4.20.43.01.18	Daerah	Dana Alokasi Umum	30.000.000
	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Survei Lapangan/ Monitoring Dalam Daerah		
4.20.43.01.19	Monitoring Dalam Daerah	Dana Alokasi Umum	20.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
4.20.43.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	8.000.000
4.20.43.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	7.500.000
4.20.43.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	25.372.500
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan		
4.20.43.02.24	Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	32.520.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		
4.20.43.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Dana Alokasi Umum	18.000.000
4.20.43.03.06	Pelaksanaan HUT RI Di Distrik	Dana Alokasi Umum	83.605.500
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		
4.20.43.21.14	Penyelenggaraan Musrenbang Distrik	Dana Alokasi Umum	10.000.000
	Distrik Asotipo		
4.20.44.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	2.628.496.821
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
4.20.44.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum	1.000.000
4.20.44.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dana Alokasi Umum	18.000.000
4.20.44.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dana Alokasi Umum	32.658.000
4.20.44.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum	6.845.000
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		
4.20.44.01.18	Daerah	Dana Alokasi Umum	30.000.000
	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Survei Lapangan/ Monitoring Dalam Daerah		
4.20.44.01.19	Monitoring Dalam Daerah	Dana Alokasi Umum	30.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
4.20.44.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	20.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan		
4.20.44.02.24	Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	36.297.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		

4.20.44.03.06	Pelaksanaan HUT RI Di Distrik	Dana Alokasi Umum	45.800.000
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		
4.20.44.18.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dana Alokasi Umum	64.650.000
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		
4.20.44.21.14	Penyelenggaraan Musrenbang Distrik	Dana Alokasi Umum	14.750.000
	Distrik Maima		
4.20.45.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	2.047.260.574
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
4.20.45.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum	2.000.000
4.20.45.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dana Alokasi Umum	30.000.000
4.20.45.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dana Alokasi Umum	34.193.000
4.20.45.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum	10.250.000
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		
4.20.45.01.18		Dana Alokasi Umum	45.000.000
	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Survei Lapangan/ Monitoring Dalam Daerah		
4.20.45.01.19		Dana Alokasi Umum	25.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
4.20.45.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	36.145.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		
4.20.45.02.24		Dana Alokasi Umum	21.312.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		
4.20.45.03.06	Pelaksanaan HUT RI Di Distrik	Dana Alokasi Umum	39.600.000
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		
4.20.45.18.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dana Alokasi Umum	42.500.000
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		
4.20.45.21.14	Penyelenggaraan Musrenbang Distrik	Dana Alokasi Umum	14.000.000
	Distrik Wesaput		
4.20.46.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	2.421.298.329
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
4.20.46.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum	2.500.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		
4.20.46.01.06		Dana Alokasi Umum	2.500.000
4.20.46.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dana Alokasi Umum	24.000.000
4.20.46.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dana Alokasi Umum	20.250.000
4.20.46.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum	6.750.000
4.20.46.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dana Alokasi Umum	7.000.000
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		
4.20.46.01.18		Dana Alokasi Umum	25.000.000
	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Survei Lapangan/ Monitoring Dalam Daerah		
4.20.46.01.19		Dana Alokasi Umum	25.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
4.20.46.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	24.500.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		
4.20.46.02.24		Dana Alokasi Umum	21.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		
4.20.46.02.28		Dana Alokasi Umum	4.000.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		
4.20.46.03.06	Pelaksanaan HUT RI Di Distrik	Dana Alokasi Umum	52.500.000

	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		
4.20.46.18.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dana Alokasi Umum	50.500.000
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		
4.20.46.21.14	Penyelenggaraan Musrenbang Distrik	Dana Alokasi Umum	34.500.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		
4.20.46.22.01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ilokama	Dana Alokasi Umum	1.102.630.000
	Distrik Wame		
4.20.47.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	823.394.486
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
4.20.47.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum	1.000.000
4.20.47.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dana Alokasi Umum	48.000.000
4.20.47.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dana Alokasi Umum	16.138.000
4.20.47.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dana Alokasi Umum	70.900.000
4.20.47.01.19	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Survei Lapangan/ Monitoring Dalam Daerah	Dana Alokasi Umum	80.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
4.20.47.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	5.900.000
4.20.47.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	8.000.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		
4.20.47.03.06	Pelaksanaan HUT RI Di Distrik	Dana Alokasi Umum	52.062.000
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		
4.20.47.18.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dana Alokasi Umum	18.000.000
	Distrik Popukoba		
4.20.48.00.00	Belanja Tidak Langsung	Dana Alokasi Umum	1.571.067.087
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
4.20.48.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum	1.000.000
4.20.48.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dana Alokasi Umum	24.000.000
4.20.48.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dana Alokasi Umum	29.988.000
4.20.48.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dana Alokasi Umum	40.000.000
4.20.48.01.19	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Survei Lapangan/ Monitoring Dalam Daerah	Dana Alokasi Umum	23.305.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
4.20.48.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dana Alokasi Umum	15.000.000
4.20.48.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dana Alokasi Umum	29.852.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		
4.20.48.03.06	Pelaksanaan HUT RI Di Distrik	Dana Alokasi Umum	44.605.000
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		
4.20.48.18.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dana Alokasi Umum	77.500.000
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		
4.20.48.21.14	Penyelenggaraan Musrenbang Distrik	Dana Alokasi Umum	14.750.000